



Katalog BPS: 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2013



BADAN PUSAT STATISTIK



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2013



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2013

ISSN: 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1308

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman: xvi + 103 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh: CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan *series Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), dan Triwulan III (Agustus) tahun 2013. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, November 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin
NIP. 19560805 197903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas dan KILM	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>), dan Ketidakaktifan	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	22
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja	22
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan	23
3. Partisipasi dalam Dunia Kerja (KILM 1)	25
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>)	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	33
4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	37

4.4.	KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	41
4.5.	KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	45
4.6.	KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal	49
5.	Indikator Pengangguran	53
5.1.	KILM 8. Pengangguran	53
5.2.	KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	56
5.3.	KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	59
5.4.	KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	64
5.5.	KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	68
6.	Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	71
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	71
	LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2013	26
Tabel 2.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013	30
Tabel 3.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013	31
Tabel 4.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta)	34
Tabel 5.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013	35
Tabel 6.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta)	38
Tabel 7.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013	39
Tabel 8.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2013 (persen)	42
Tabel 9.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013	46
Tabel 10.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013 (dalam juta)	50
Tabel 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013	50
Tabel 12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2013 (persen)	53
Tabel 13.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013	57
Tabel 14.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 (persen)	60
Tabel 15.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013	62
Tabel 16.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2013 (dalam juta)	64
Tabel 17.	Indikator Setengah Penganggur, 2013	65
Tabel 18.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013	67
Tabel 19.	Indikator Ketidakaktifan, 2013	68
Tabel 20.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2013 (persen)	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013 (persen)	28
Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2013	32
Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013	32
Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013	36
Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Mei dan Agustus 2013	40
Grafik 7. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013 (persen)	43
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013 (persen)	44
Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2013	48
Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Mei dan Agustus 2013	52
Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Agustus 2013	52
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013 (persen)	54
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2013	63
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Mei dan Agustus 2013	66
Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Mei dan Agustus 2013 (persen)	70
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2013	73
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2013	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam ribu)	75
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013 (dalam juta)	78
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam ribu)	79
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2013 (dalam juta)	80
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (persen)	81
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam ribu)	82
Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013	83
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013	84
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013	86
Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (persen)	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 (persen)	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013	94
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013.....	95

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, 2013 (dalam ribu)	96
Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (persen)	97
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013	98
Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2013 (rupiah)	99
Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2013 (rupiah)	100
Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (rupiah)	101
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2013 (rupiah)	102
Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama	103

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 mencapai 118,19 juta orang, secara absolut turun sebanyak 3,47 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 (121,66 juta orang) dan turun sebanyak 3,00 juta orang dibandingkan keadaan Februari 2013 (121,19 juta orang).

Secara nasional, angka EPR pada Agustus 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Mei 2013, yaitu menurun 2,51 poin dari angka 65,23 menjadi 62,72 pada Agustus 2013 ini. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 63 orang yang bekerja pada Agustus 2013. Jika dibandingkan keadaan Februari 2013, EPR Sakernas Agustus 2013 juga mengalami penurunan, yaitu menurun sebesar 2,40 poin dari angka 65,12.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2013 ini polanya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013. Persentase terbesar diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha, yang menurun sebesar 0,55 persen poin dari 47,62 persen menjadi 47,07 persen. Persentase terbesar berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang

naik sebesar 0,40 persen poin dari 36,63 persen menjadi 37,03 persen. Untuk penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga naik sebesar 0,15 persen poin dari 15,75 persen menjadi 15,90 persen.

Hasil Sakernas Agustus 2013 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 45,04 persen, sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua sebesar 34,36 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,60 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Agustus 2013 mencapai 23,39 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami kenaikan sebesar 3,78 persen poin dibanding keadaan Mei 2013 (19,61 persen), dan juga mengalami kenaikan sebesar 3,96 persen jika dibandingkan keadaan Februari 2013 (19,43 persen). Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 31,90 persen dan 18,28 persen.

Merujuk pada hasil Sakernas pada Agustus 2013, ternyata sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu, yakni pada kisaran dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Agustus 2013 mencapai 39,49 persen atau mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,87 persen poin jika dibandingkan dengan Mei 2013 (32,62 persen), juga mengalami kenaikan sebesar 6,15 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2013 (33,34 persen).

Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa dari 110,80 juta orang yang bekerja, sebanyak 52,58 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (58,26 juta orang). Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2013 sebesar 53,48 persen, naik tipis menjadi 53,56 persen pada Mei 2013 dan turun pada Agustus 2013 menjadi 52,58 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2013 mencapai 46,52 persen, turun menjadi 46,44 persen pada Mei 2013, dan meningkat pada Agustus 2013 mencapai 47,42 persen.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 cenderung mengalami kenaikan bila dibanding Mei maupun Februari 2013. TPT pada Agustus 2013 sebesar 6,25 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang

masuk kategori penganggur. TPT pada Agustus 2013 ini mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen poin bila dibandingkan Mei 2013 (5,81 persen), dan naik sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Februari 2013 (5,92 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013, TPT penduduk pada kelompok umur muda sebesar 21,64 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 22 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 3,62 persen poin bila dibandingkan dengan Mei 2013 (18,02 persen) atau naik sebesar 4,11 bila dibandingkan Februari 2013 (17,53 persen).

Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa secara umum TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 10,27 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,47 persen.

Berdasarkan Sakernas Agustus 2013 jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 10,89 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari sejumlah 7,28 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,61 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Agustus 2013, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat

dibanding di perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 7,44 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,45 juta orang.

Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan di Indonesia adalah 33,10 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 33,10 persen.

Hasil Sakernas Februari, Mei dan Agustus 2013 menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan Mei 2013, tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,36 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 naik sebesar 2,31 persen poin. Seiring kenaikan tingkat ketidakaktifan juga diikuti kenaikan jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja, yaitu sebanyak 4,47 juta orang dari 54,00 juta orang pada Mei 2013 menjadi 58,47 juta orang pada Agustus 2013.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan Sakernas pada Mei 2013. Angkatan kerja pada Agustus 2013 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 59,89 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,24 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,41 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,46 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah.

1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, sejak Triwulan

I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan,

tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu; bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan

Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011–Agustus 2013, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, SUPAS dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 final yang diproyeksikan ke bulan Agustus 2013.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah

dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja

(KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi

pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak"

untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang

produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era

globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak

aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan,

misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisa apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat

terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja

dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<http://www.bps.go.id>

2. PENJELASAN TEKNIS

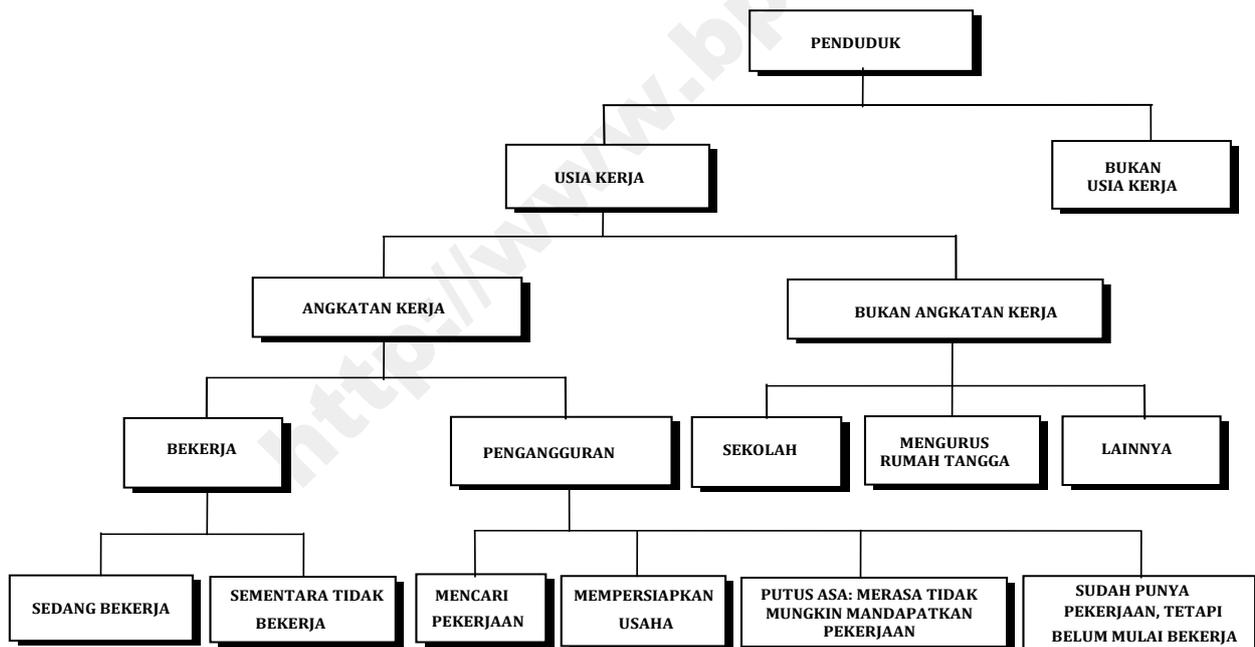
Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang

dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10

tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumor,

dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, baik telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut

digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung

dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran),

- KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
 5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
 6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
 7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
 8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun keatas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk

alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan

nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan

pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam keatas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

Konferensi Internasional Stasisi Tenaga Kerja ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak

tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (*UNDEREMPLOYMENT*), DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang diperoleh dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada

kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika

diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;

- b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga

perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada

wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴⁾, dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

⁴⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh

karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi *L* (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian

sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan

ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga

memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3. PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 mencapai 118,19 juta orang, secara absolut turun sebanyak 3,47 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 (121,66 juta orang) dan turun sebanyak 3,00 juta orang dibandingkan keadaan Februari 2013 (121,19 juta orang), lihat Lampiran 3.

Persentase TPAK mengalami penurunan dari 69,26 persen pada Mei 2013 menjadi 66,90 persen pada Agustus 2013, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Agustus 2013 turun sebesar 2,36 persen poin. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2013, TPAK Agustus 2013 juga menurun sebesar 2,31 persen poin.

Pada umumnya TPAK laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Sebagai gambaran pada Agustus 2013, TPAK laki-laki mencapai 83,58 persen sementara pada perempuan hanya 50,28 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 84 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja hanya sebanyak 50 orang yang termasuk angkatan kerja. Pada periode Mei 2013–Agustus 2013, TPAK laki-laki

turun 1,73 persen poin dan TPAK perempuan juga turun 2,98 persen poin. Pola yang sama juga terjadi pada periode Februari 2013–Agustus 2013, dimana TPAK untuk laki-laki turun sebesar 1,54 persen poin dan TPAK perempuan juga menurun sebesar 3,08 persen poin.

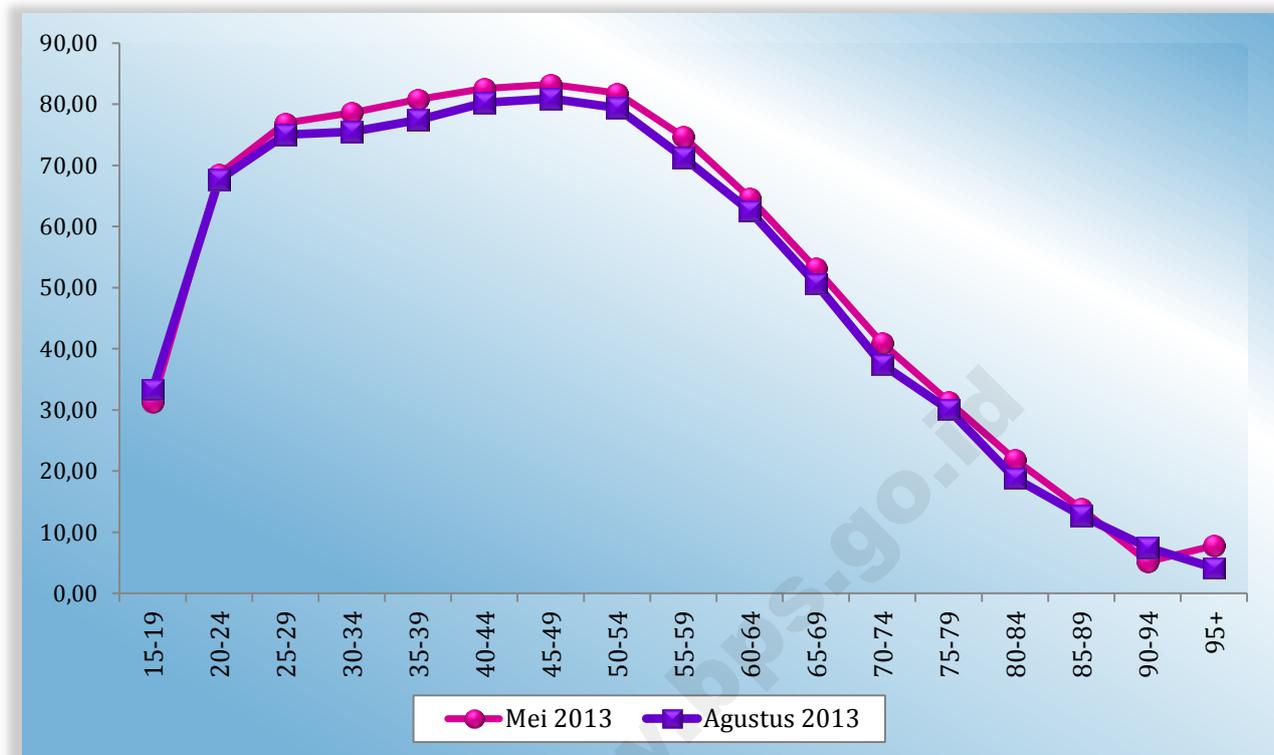
Pada periode Mei 2013–Agustus 2013, persentase TPAK mengalami penurunan pada semua kelompok umur, kelompok umur yang mengalami penurunan terbesar adalah pada kelompok umur 55–64 tahun yang menurun sebesar 2,77 persen poin (Tabel 1). Pola yang sama juga terjadi pada periode Februari 2013–Agustus 2013, dimana penurunan TPAK terjadi pada semua kelompok umur dan penurunan terbesar juga terdapat pada kelompok umur 55–64 tahun yang menurun sebesar 2,52 persen poin.

Grafik 1 menunjukkan bahwa pola TPAK menurut kelompok umur pada keadaan Mei 2013 pada umumnya lebih tinggi dibandingkan Agustus 2013, hanya pada kelompok umur tertentu saja TPAK terlihat hampir berhimpitan, yaitu pada kelompok umur 20–24 tahun dan 85–89 tahun. Jarak atau pergeseran grafik yang paling mencolok berada pada kelompok umur 95 tahun keatas.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2013
(persen)

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	69,21	69,26	66,90
Laki-laki	85,12	85,31	83,58
Perempuan	53,36	53,26	50,28
Perkotaan	66,96	67,38	64,44
Perdesaan	71,48	71,21	69,45
(15–24)	50,01	49,49	48,27
Laki-laki	60,85	60,21	57,72
Perempuan	39,04	38,65	38,71
Perkotaan	48,71	48,23	46,85
Perdesaan	51,31	50,86	49,82
(15–64)	71,38	71,36	69,14
Laki-laki	87,07	87,08	85,61
Perempuan	55,49	55,43	52,46
Perkotaan	69,40	69,61	66,76
Perdesaan	73,39	73,20	71,64
(25–54)	80,15	80,30	77,74
Laki-laki	97,73	98,04	96,97
Perempuan	62,38	62,35	58,30
Perkotaan	78,63	79,24	75,75
Perdesaan	81,70	81,42	79,84
(25–34)	77,77	77,73	75,28
Laki-laki	97,17	97,39	96,22
Perempuan	58,33	58,03	54,31
Perkotaan	77,61	78,11	74,88
Perdesaan	77,93	77,29	75,73
(35–54)	81,77	82,05	79,42
Laki-laki	98,11	98,48	97,47
Perempuan	65,16	65,32	61,04
Perkotaan	79,33	80,04	76,37
Perdesaan	84,24	84,10	82,53
(55–64)	70,02	70,27	67,50
Laki-laki	86,12	85,91	84,43
Perempuan	53,41	54,05	50,19
Perkotaan	62,50	62,93	60,00
Perdesaan	77,71	77,14	74,45
65 Tahun keatas	39,55	39,88	37,38
Laki-laki	54,88	57,02	53,42
Perempuan	27,36	26,40	24,37
Perkotaan	32,13	31,81	29,97
Perdesaan	46,46	46,48	43,56

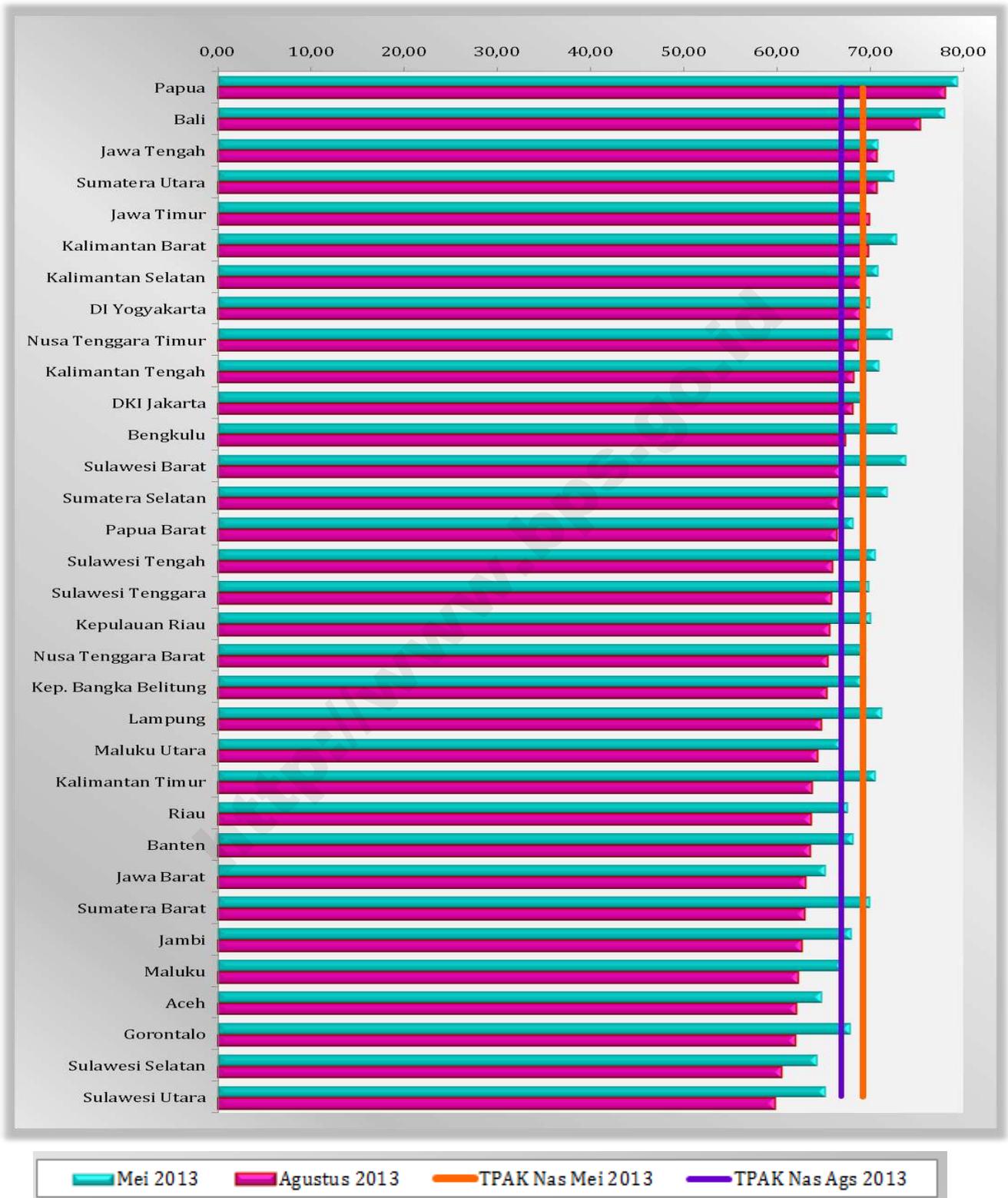
Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2013
(persen)



TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Papua (78,01 persen), Provinsi Bali (75,35 persen) dan Provinsi Jawa Tengah (70,72 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan Sakernas Mei 2013 posisi pertama dan kedua masih diduduki oleh Provinsi Papua (79,45 persen) dan Provinsi Bali (78,03 persen), hanya posisi ketiga yang berbeda, yang diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (73,84

persen). Untuk provinsi dengan TPAK terendah pada Agustus 2013 ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Utara (59,76 persen), Sulawesi Selatan (60,49 persen), dan Gorontalo (62,00 persen). Urutan tiga provinsi dengan TPAK terendah sedikit berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, dimana posisi ini berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (64,31 persen), Provinsi Aceh (64,84 persen) dan Provinsi Sulawesi Utara (65,23 persen). (Grafik 2).

Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013
(persen)



4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

Secara nasional, angka EPR pada Agustus 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Mei 2013, yaitu menurun 2,51 poin dari angka 65,23 menjadi 62,72 pada Agustus 2013 ini. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 63 orang yang bekerja pada Agustus 2013. EPR Agustus 2013 juga mengalami penurunan sebesar 2,40 poin dari angka 65,12 jika dibandingkan keadaan Februari 2013.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, EPR laki-laki lebih tinggi hampir dua kali lipat dari EPR perempuan baik pada periode Februari, Mei maupun Agustus 2013. EPR laki-laki pada periode Agustus 2013 sebesar 78,49 mengalami penurunan sebesar 2,14 poin jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013. EPR perempuan pada Agustus 2013 sebesar 47,01 mengalami penurunan sebesar 2,88 poin dibandingkan keadaan Mei 2013.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, EPR daerah perkotaan pada periode

Mei 2013–Agustus 2013 turun 2,89 poin dari angka 62,56 menjadi 59,67. Sedangkan untuk daerah perdesaan juga mengalami penurunan sebesar 2,12 poin dari angka 68,00 menjadi 65,88 pada Agustus 2013 ini.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode Mei 2013–Agustus 2013 menurun sebesar 2,74 poin dari 40,57 menjadi 37,83. Sedangkan pada periode Februari 2013–Agustus 2013 EPR penduduk kelompok umur muda mengalami penurunan sebesar 3,41 poin dari 41,24.

Untuk penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun keatas), pada periode Mei 2013–Agustus 2013, mengalami penurunan EPR sebesar 2,43 poin, yaitu dari angka 73,09 pada Mei 2013 turun menjadi 70,66 pada Agustus 2013. Begitu pula untuk periode Februari 2013–Agustus 2013 EPR pada kelompok ini juga menurun sebesar 2,06 poin dari angka 72,72 (Tabel 3).

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013
(dalam juta)

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun keatas	175,10	175,66	176,66
Laki-laki	87,40	87,68	88,19
Perempuan	87,70	87,97	88,47
Perkotaan	87,90	89,33	89,87
Perdesaan	87,20	86,32	86,79
Umur Muda (15–24)	42,31	42,45	42,70
Laki-laki	21,28	21,35	21,48
Perempuan	21,03	21,10	21,23
Perkotaan	21,15	22,12	22,26
Perdesaan	21,16	20,33	20,45
Umur Dewasa (25+)	132,79	133,20	133,96
Laki-laki	66,12	66,33	66,71
Perempuan	66,67	66,87	67,25
Perkotaan	66,74	67,21	67,61
Perdesaan	66,05	65,99	66,34
Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja	114,02	114,59	110,80
Laki-laki	70,21	70,70	69,21
Perempuan	43,81	43,89	41,59
Perkotaan	54,56	55,89	53,62
Perdesaan	59,46	58,70	57,18
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	17,45	17,22	16,15
Laki-laki	10,64	10,46	9,76
Perempuan	6,81	6,77	6,40
Perkotaan	8,23	8,60	7,98
Perdesaan	9,22	8,63	8,17
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	96,57	97,36	94,65
Laki-laki	59,56	60,24	59,46
Perempuan	37,01	37,12	35,19
Perkotaan	46,33	47,29	45,64
Perdesaan	50,24	50,07	49,01

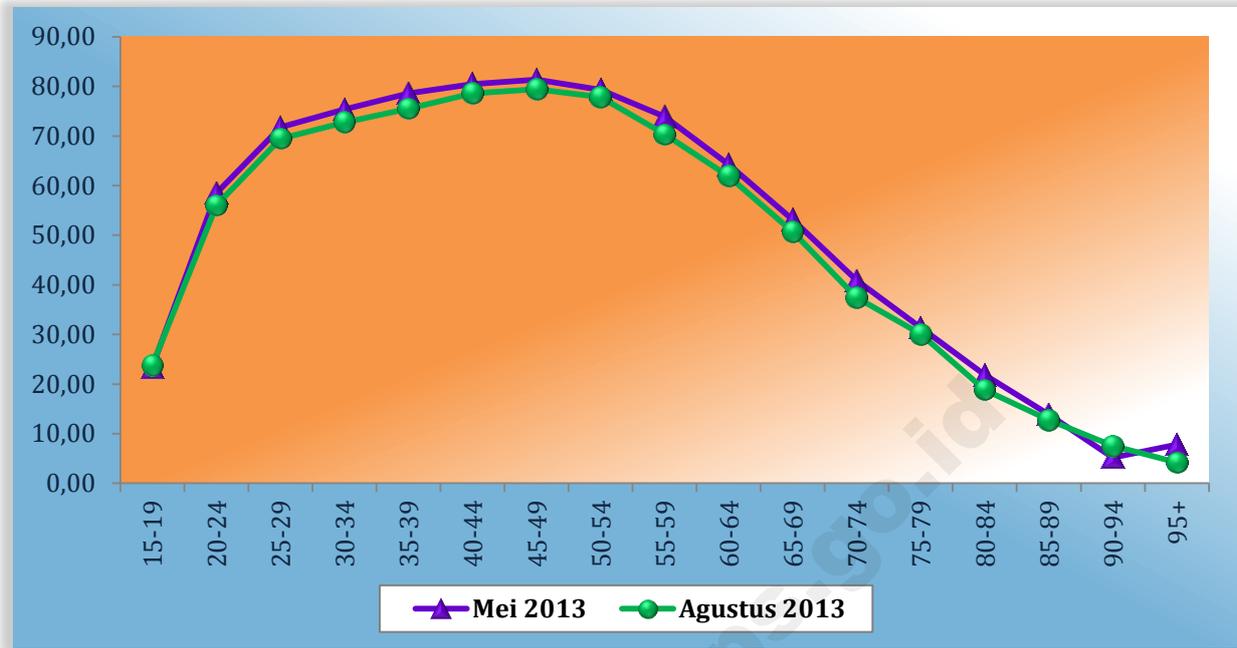
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	65,12	65,23	62,72
Laki-laki	80,32	80,63	78,49
Perempuan	49,96	49,89	47,01
Perkotaan	62,08	62,56	59,67
Perdesaan	68,18	68,00	65,88
Umur Muda (15–24)	41,24	40,57	37,83
Laki-laki	50,00	48,97	45,42
Perempuan	32,38	32,07	30,14
Perkotaan	38,91	38,85	35,87
Perdesaan	43,57	42,45	39,95
Umur Dewasa (25+)	72,72	73,09	70,66
Laki-laki	90,08	90,82	89,13
Perempuan	55,51	55,51	52,33
Perkotaan	69,42	70,36	67,50
Perdesaan	76,06	75,87	73,88

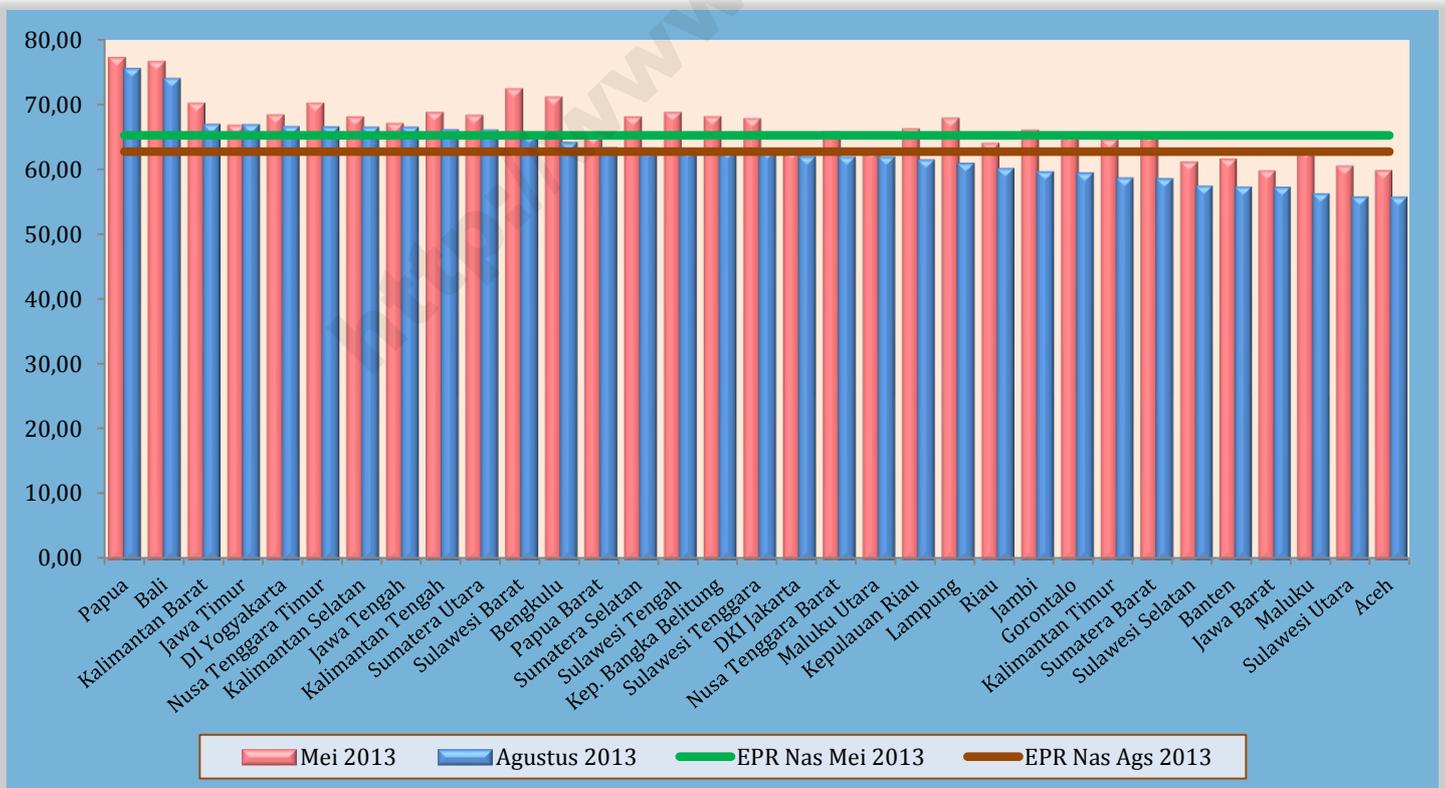
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 3 mirip dengan pola TPAK. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR untuk Sakernas 2013 ini berada pada kelompok umur 45–49 tahun. Pada periode Mei dan Agustus 2013 grafik EPR terlihat sangat berhimpitan pada kelompok umur 15–19 tahun.

Grafik 4 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Agustus 2013, yaitu Provinsi Papua (75,49), Bali (74,00) dan Kalimantan Barat (66,94). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Provinsi Aceh (55,68), Sulawesi Utara (55,77) dan Provinsi Maluku (56,24). Ketiga provinsi dengan EPR terendah ini berada jauh dari nilai EPR rata-rata nasional yaitu 62,72.

Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2013



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013



4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2013 ini polanya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013. Persentase terbesar diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha, yang menurun sebesar 0,55 persen poin dari 47,62 persen menjadi 47,07 persen. Persentase terbesar berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang naik sebesar 0,40 persen poin dari 36,63 persen menjadi 37,03 persen. Untuk penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga naik sebesar 0,15 persen poin dari 15,75 persen menjadi 15,90 persen.

Jika dibandingkan dengan keadaan pada periode Februari–Agustus 2013, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,58 persen poin, dan penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada keadaan Agustus 2013 mencapai 59,58 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 60 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, persentase pekerja rentan

mengalami sedikit penurunan sebesar 0,06 persen poin, begitu pula bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, persentase pekerja rentan juga menurun sebesar 0,44 persen poin.

Keadaan pekerja rentan menurut jenis kelamin pada Februari, Mei maupun Agustus 2013 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki, sebagai fakta pada Agustus 2013 ini persentase pekerja rentan perempuan sebesar 64,64 persen, lebih tinggi dari persentase pekerja rentan laki-laki yang hanya sebesar 56,53 persen.

Persentase pekerja rentan menurut provinsi yang ada di Indonesia ditunjukkan pada Grafik 5. Pada keadaan Agustus 2013, provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi adalah Provinsi Papua (81,24 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (79,29 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (75,49 persen). Persentase pekerja rentan pada ketiga provinsi tersebut jauh di atas persentase rata-rata pekerja rentan untuk tingkat nasional yang hanya sebesar 59,58 persen. Sementara itu, persentase pekerja rentan terendah pada Agustus 2013 diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (27,55 persen), kemudian Provinsi DKI Jakarta (29,04 persen) dan urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Banten (39,64 persen).

Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta)

Status Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	114,02	114,59	110,80
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	41,56	41,98	41,03
Berusaha	53,97	54,56	52,15
Pengusaha	4,02	4,27	3,76
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	38,52	38,42	37,37
Pekerja bebas	11,43	11,87	11,02
Pekerja keluarga	18,49	18,05	17,62
Pekerja rentan*)	68,44	68,34	66,01
Laki-laki	70,21	70,70	69,21
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	26,86	27,05	27,05
Berusaha	38,32	38,82	37,37
Pengusaha	3,24	3,41	3,04
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	26,37	26,42	26,06
Pekerja bebas	8,71	8,99	8,27
Pekerja keluarga	5,03	4,83	4,79
Pekerja rentan*)	40,11	40,23	39,13
Perempuan	43,81	43,89	41,59
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	14,70	14,93	13,99
Berusaha	15,65	15,75	14,78
Pengusaha	0,78	0,85	0,72
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	12,15	12,01	11,31
Pekerja bebas	2,72	2,89	2,75
Pekerja keluarga	13,46	13,21	12,82
Pekerja rentan*)	28,33	28,11	26,88

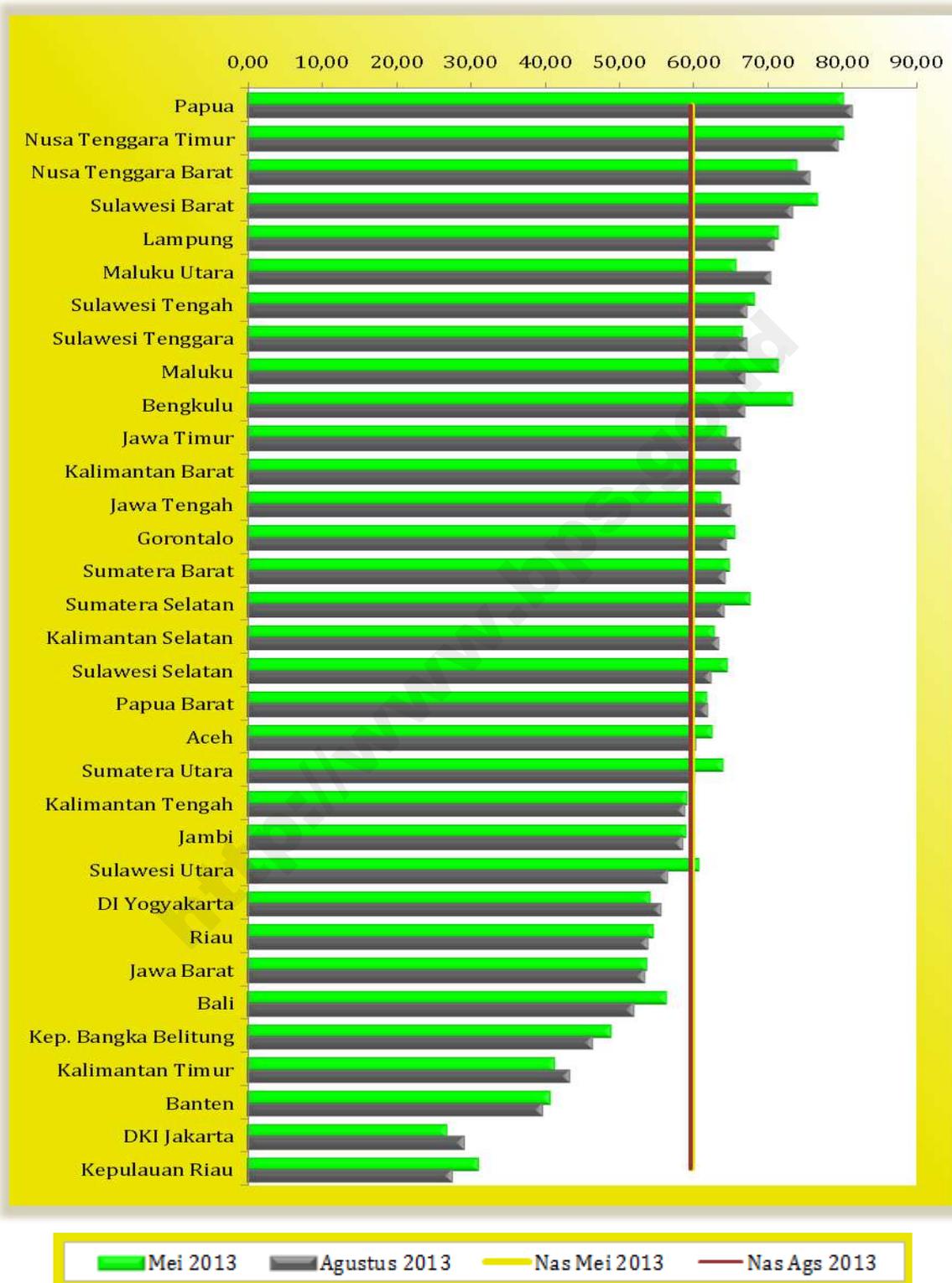
Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013

Status Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,45	36,63	37,03
Berusaha	47,33	47,62	47,07
Pengusaha	3,53	3,73	3,39
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	33,78	33,53	33,73
Pekerja bebas	10,02	10,36	9,95
Pekerja keluarga	16,22	15,75	15,90
Pekerja rentan*)	60,02	59,64	59,58
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,26	38,26	39,08
Berusaha	54,58	54,91	53,99
Pengusaha	4,61	4,83	4,39
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	37,56	37,37	37,65
Pekerja bebas	12,41	12,71	11,95
Pekerja keluarga	7,16	6,83	6,93
Pekerja rentan*)	57,13	56,91	56,53
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	33,55	34,01	33,63
Berusaha	35,73	35,88	35,54
Pengusaha	1,79	1,95	1,73
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	27,74	27,35	27,19
Pekerja bebas	6,20	6,58	6,62
Pekerja keluarga	30,72	30,11	30,83
Pekerja rentan*)	64,66	64,04	64,64

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013



4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Hasil Sakernas Agustus 2013 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 45,04 persen, sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua sebesar 34,36 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,60 persen.

Apabila diuraikan lebih lanjut, sektor jasa-jasa disumbang oleh sektor perdagangan sebesar 21,42 persen, sektor jasa kemasyarakatan (16,44 persen), sektor transportasi (4,55 persen), dan sektor keuangan (2,63 persen). Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri dan sektor bangunan dengan persentase masing-masing sebesar 13,43 persen dan 5,66 persen.

Kontribusi sektoral hasil Sakernas Agustus 2013 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, sektor jasa-jasa naik sebesar 0,61 persen poin dari 44,43 persen. Diikuti dengan sektor manufaktur yang juga naik sebesar 0,46 persen poin dari 20,14 persen. Hanya sektor pertanian yang mengalami penurunan yaitu sebesar 1,07 persen poin dari 35,43 persen. Pola perubahan ini tidak berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, dimana sektor yang mengalami penurunan hanya sektor pertanian

yaitu menurun sebesar 0,69 persen poin sedangkan sektor jasa-jasa dan sektor manufaktur mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,68 persen poin dan 0,01 persen poin.

Komposisi sektoral Sakernas Agustus 2013 menurut provinsi menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian berturut-turut adalah Provinsi Papua (72,90 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (60,90 persen), dan Provinsi Kalimantan Barat (57,57 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, urutan provinsi dengan penduduk bekerja tertinggi di sektor pertanian hanya berbeda di urutan ketiga yaitu diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Sementara itu, untuk sektor manufaktur persentase tertinggi pada Agustus 2013 diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (37,70 persen), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (32,68 persen), dan Provinsi Banten (32,49 persen). Untuk sektor jasa-jasa pada keadaan Agustus 2013 persentase tertinggi masih diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,90 persen, diikuti oleh Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta dimana persentasenya jauh di bawah DKI Jakarta, yaitu masing-masing hanya sebesar 52,52 persen dan 52,37 persen.

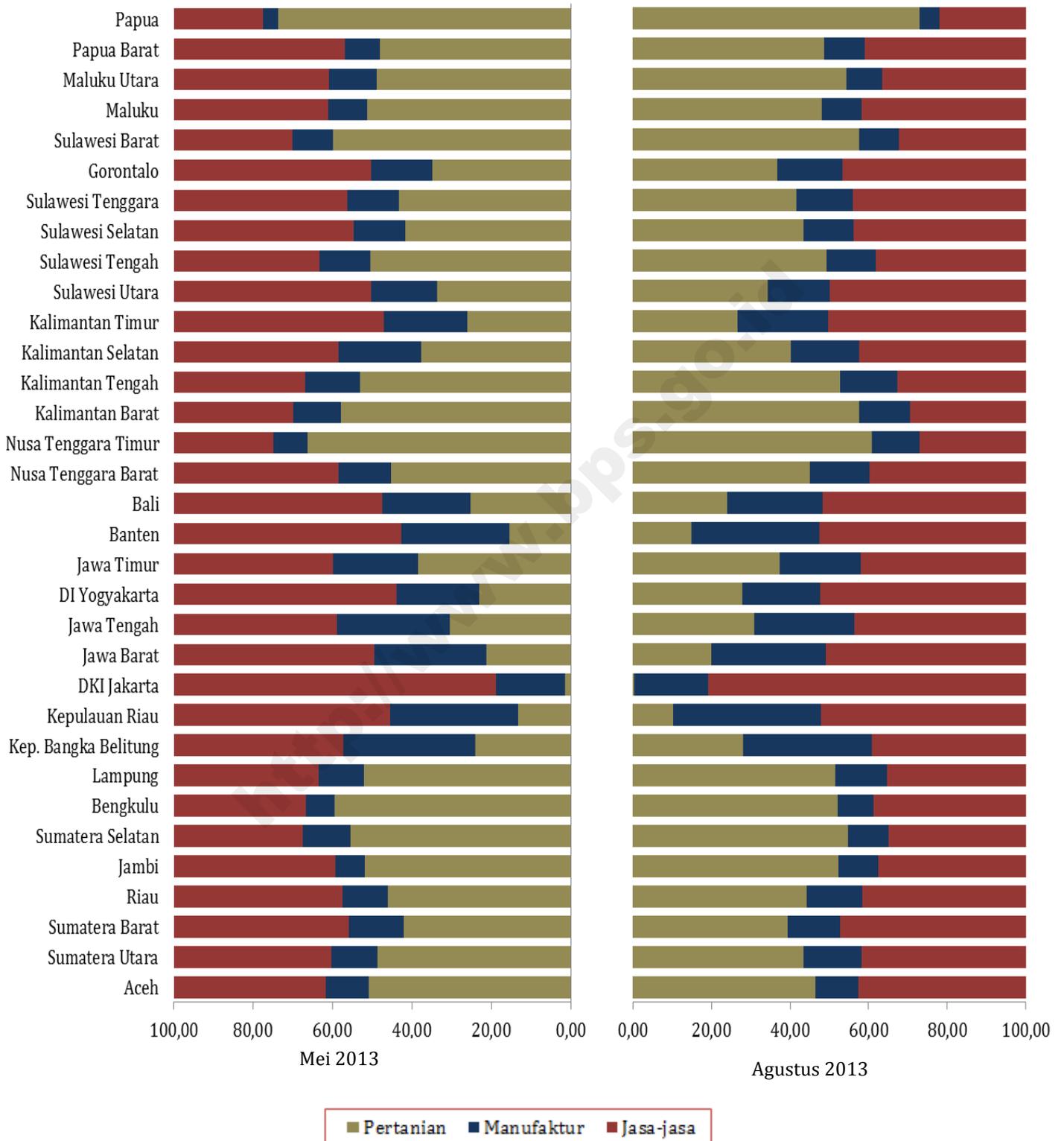
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta)

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	114,02	114,59	110,80
Pertanian	39,96	40,60	38,07
Manufaktur	23,48	23,08	22,83
Pertambangan	1,56	1,61	1,42
Industri	14,78	14,51	14,88
Listrik, gas dan air	0,25	0,26	0,25
Bangunan	6,89	6,71	6,28
Jasa-jasa	50,58	50,91	49,90
Perdagangan	24,81	24,53	23,74
Transportasi	5,23	5,09	5,04
Keuangan	3,01	3,09	2,91
Jasa kemasyarakatan	17,53	18,21	18,21
Laki-laki	70,21	70,70	69,21
Pertanian	24,94	25,48	24,33
Manufaktur	16,95	16,77	16,50
Pertambangan	1,41	1,44	1,31
Industri	8,58	8,57	8,88
Listrik, gas dan air	0,22	0,23	0,22
Bangunan	6,74	6,53	6,09
Jasa-jasa	28,32	28,45	28,38
Perdagangan	11,88	11,73	11,73
Transportasi	4,93	4,76	4,70
Keuangan	2,21	2,23	2,13
Jasa kemasyarakatan	9,30	9,73	9,82
Perempuan	43,81	43,89	41,59
Pertanian	15,02	15,12	13,73
Manufaktur	6,53	6,31	6,33
Pertambangan	0,14	0,17	0,11
Industri	6,21	5,94	6,00
Listrik, gas dan air	0,03	0,03	0,03
Bangunan	0,15	0,17	0,19
Jasa-jasa	22,26	22,46	21,53
Perdagangan	12,92	12,80	12,01
Transportasi	0,30	0,33	0,34
Keuangan	0,80	0,86	0,79
Jasa kemasyarakatan	8,24	8,47	8,39

Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Pertanian	35,05	35,43	34,36
Manufaktur	20,59	20,14	20,60
Pertambangan	1,36	1,40	1,28
Industri	12,97	12,66	13,43
Listrik, gas dan air	0,22	0,23	0,23
Bangunan	6,04	5,85	5,66
Jasa-jasa	44,36	44,43	45,04
Perdagangan	21,75	21,40	21,42
Transportasi	4,59	4,45	4,55
Keuangan	2,64	2,69	2,63
Jasa kemasyarakatan	15,38	15,89	16,44
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Pertanian	35,52	36,04	35,16
Manufaktur	24,14	23,72	23,84
Pertambangan	2,01	2,04	1,90
Industri	12,22	12,12	12,83
Listrik, gas dan air	0,32	0,32	0,31
Bangunan	9,59	9,24	8,80
Jasa-jasa	40,34	40,24	41,00
Perdagangan	16,93	16,59	16,95
Transportasi	7,02	6,74	6,79
Keuangan	3,15	3,15	3,07
Jasa kemasyarakatan	13,24	13,76	14,19
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,28	34,44	33,02
Manufaktur	14,91	14,38	15,22
Pertambangan	0,33	0,38	0,25
Industri	14,17	13,53	14,44
Listrik, gas dan air	0,07	0,07	0,08
Bangunan	0,34	0,40	0,45
Jasa-jasa	50,81	51,18	51,76
Perdagangan	29,49	29,16	28,87
Transportasi	0,69	0,75	0,82
Keuangan	1,83	1,96	1,89
Jasa kemasyarakatan	18,80	19,31	20,18

Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Mei dan Agustus 2013



4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Agustus 2013 mencapai 23,39 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami kenaikan sebesar 3,78 persen poin dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 (19,61 persen), dan juga mengalami kenaikan sebesar 3,96 persen jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 (19,43 persen). Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 31,90 persen dan 18,28 persen.

Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, tingkat pekerja paruh waktu perempuan

mengalami kenaikan signifikan sebesar 3,12 persen poin (dari 28,78 persen menjadi 31,90 persen). Untuk pekerja paruh waktu laki-laki juga mengalami kenaikan 4,37 persen poin (dari 13,91 persen menjadi 18,28 persen). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, pada Agustus 2013 tingkat pekerja paruh waktu juga mengalami kenaikan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dengan kenaikan masing-masing sebesar 5,28 persen poin dan 2,09 persen poin.

Pola yang sama juga terjadi pada Sakernas periode Februari 2013–Agustus 2013, peningkatan juga terjadi pada pekerja paruh waktu untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang masing-masing naik sebesar 3,18 persen poin dan 4,66 persen poin. Untuk tingkat pekerja paruh waktu di daerah perdesaan dan perkotaan juga mengalami peningkatan masing-masing naik sebesar 5,33 persen poin dan 2,65 persen poin.

Merujuk kembali pada hasil Sakernas Agustus 2013, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (50,45 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (40,81 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (40,74 persen). Pada periode Mei 2013, provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi juga diduduki oleh ketiga provinsi tersebut.

Untuk provinsi dengan tingkat paruh waktu terendah pada Agustus 2013 terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (7,34 persen), Provinsi Banten (11,04 persen) dan Provinsi Kepulauan Riau (12,65 persen). Sementara berdasarkan

hasil Sakernas periode Mei 2013 provinsi dengan tingkat paruh waktu terendah terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (7,34 persen), Provinsi Banten (11,00 persen) dan Provinsi Kaltim (13,36 persen) (Grafik 8).

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2013
(persen)

Indikator	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	19,43	19,61	23,39
Laki-laki	13,62	13,91	18,28
Perempuan	28,72	28,78	31,90
Perkotaan	12,65	13,21	15,30
Perdesaan	25,64	25,69	30,97
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	56,81	56,23	51,18

Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan Sakernas Agustus 2013 mencapai 51,18 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 51 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada Agustus 2013 terus mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Mei 2013 maupun Februari 2013, yaitu masing-masing menurun sebesar 5,05 persen poin dan 5,63 persen poin (Tabel 8).

Grafik 7 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pekerja

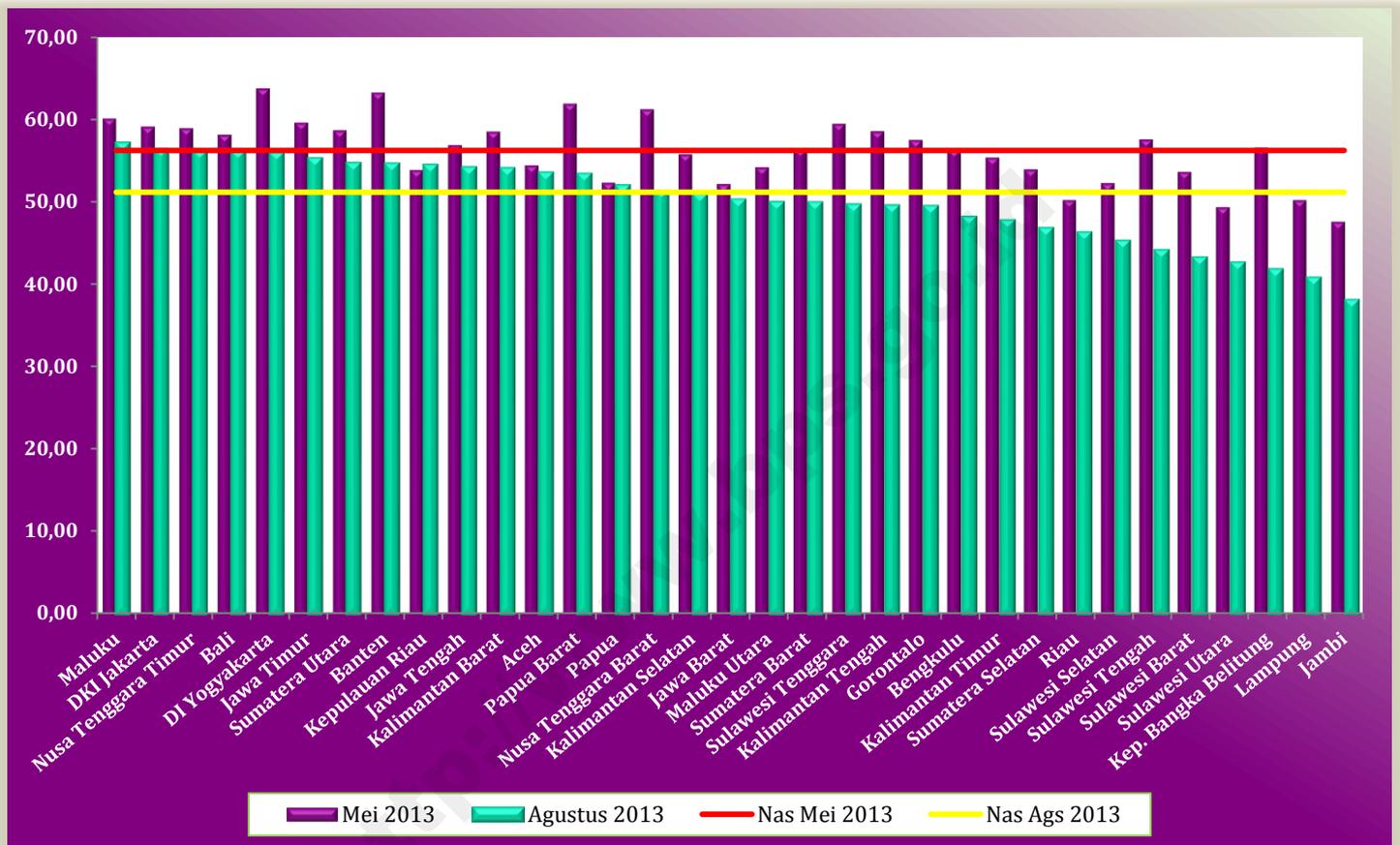
paruh waktu tertinggi pada Agustus 2013 terdapat di Provinsi Maluku (57,13 persen), Provinsi DKI Jakarta (56,34 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (56,17 persen). Sedangkan pada periode Mei 2013 posisi ini diduduki oleh Provinsi DI Yogyakarta (63,71 persen), urutan kedua diduduki oleh Provinsi Banten (63,23 persen), dan urutan ketiga Provinsi Papua Barat (61,88 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Jambi sebesar 38,09 persen, Provinsi Lampung sebesar 40,79 persen, dan Provinsi Bangka

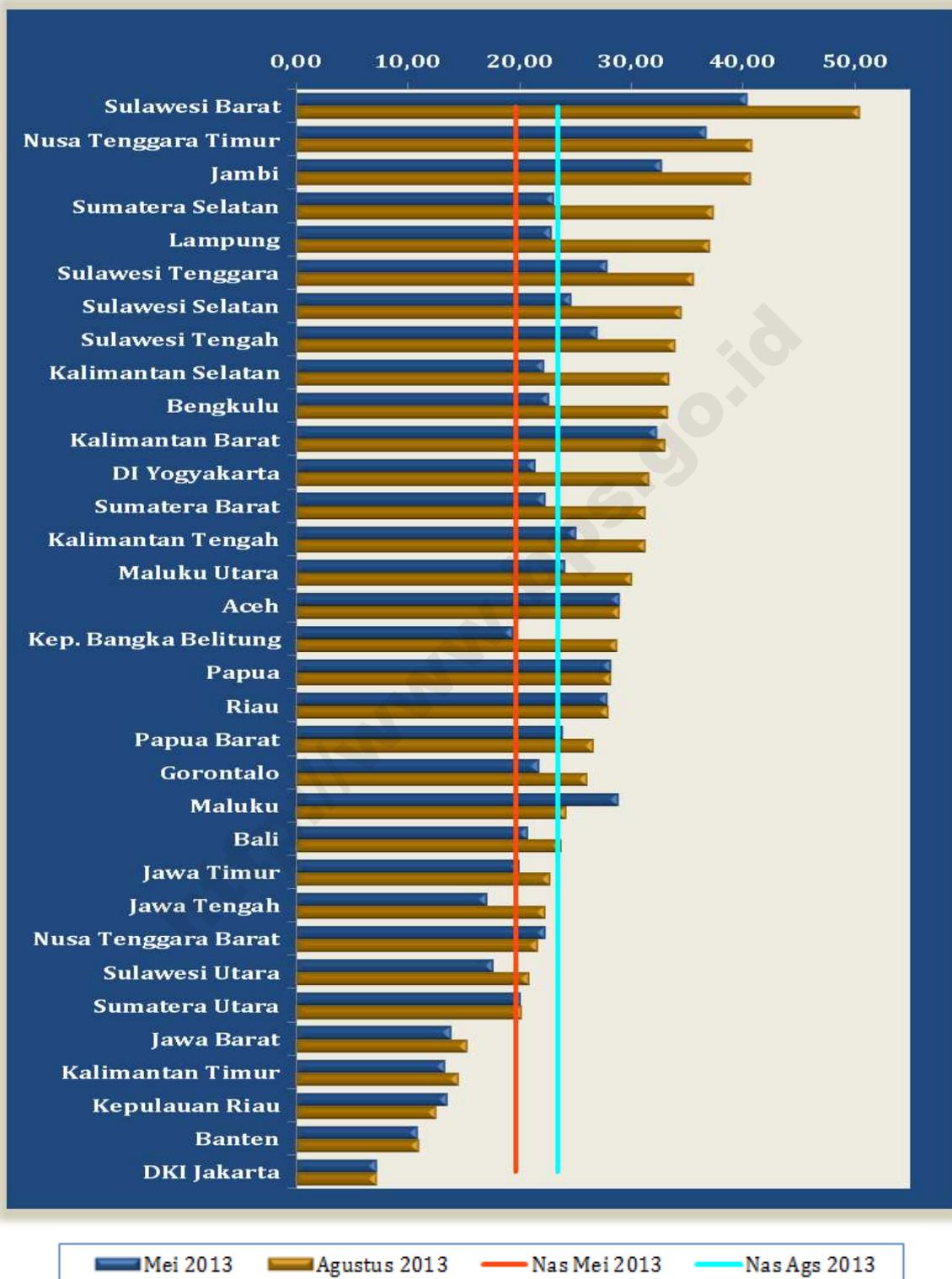
Belitung sebesar 41,83 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, posisi tersebut terdapat pada Provinsi Jambi (47,57

persen), Provinsi Sulawesi Utara (49,34 persen) dan Provinsi Lampung (50,17 persen).

Grafik 7. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013 (persen)



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013 (persen)



4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Merujuk pada hasil Sakernas pada Agustus 2013, ternyata sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu, yakni pada kisaran dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Agustus 2013 mencapai 39,49 persen atau mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,87 persen poin jika dibandingkan dengan Mei 2013 (32,62 persen), juga mengalami kenaikan sebesar 6,15 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2013 (33,34 persen).

Dapat diamati pula pada Tabel 9, hasil Sakernas pada periode Februari 2013, Mei 2013 maupun Agustus 2013, secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Misalnya seperti yang terjadi pada Agustus 2013, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu sebesar 46,61 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 35,23 persen.

Apabila kita cermati, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Hal ini dapat dilihat bahwa penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut terjadi baik pada

Februari, Mei maupun Agustus 2013. Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 50,12 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 28,17 persen.

Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 27,91 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 22,36 persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada Agustus 2013, persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 18,69 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu mencapai 24,55 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013

Jumlah Jam Kerja	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,02	1,60	6,27
1-14 jam	6,18	5,72	7,77
15-24 jam	11,42	11,58	13,27
25-34 jam	13,72	13,72	12,18
35-39 jam	10,17	10,09	10,24
40-48 jam	29,84	30,40	27,91
49-59 jam	15,25	15,38	12,79
60 jam keatas	11,40	11,51	9,57
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,08	1,65	6,42
1-14 jam	4,09	3,53	5,66
15-24 jam	8,41	8,73	11,47
25-34 jam	12,09	12,06	11,68
35-39 jam	9,68	9,66	9,75
40-48 jam	33,87	34,47	30,47
49-59 jam	18,13	18,24	14,67
60 jam keatas	11,65	11,66	9,88
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,92	1,52	6,03
1-14 jam	9,52	9,23	11,28
15-24 jam	16,24	16,18	16,27
25-34 jam	16,34	16,39	13,03
35-39 jam	10,94	10,80	11,05
40-48 jam	23,39	23,84	23,65
49-59 jam	10,64	10,78	9,65
60 jam keatas	11,01	11,26	9,04

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013 (lanjutan)

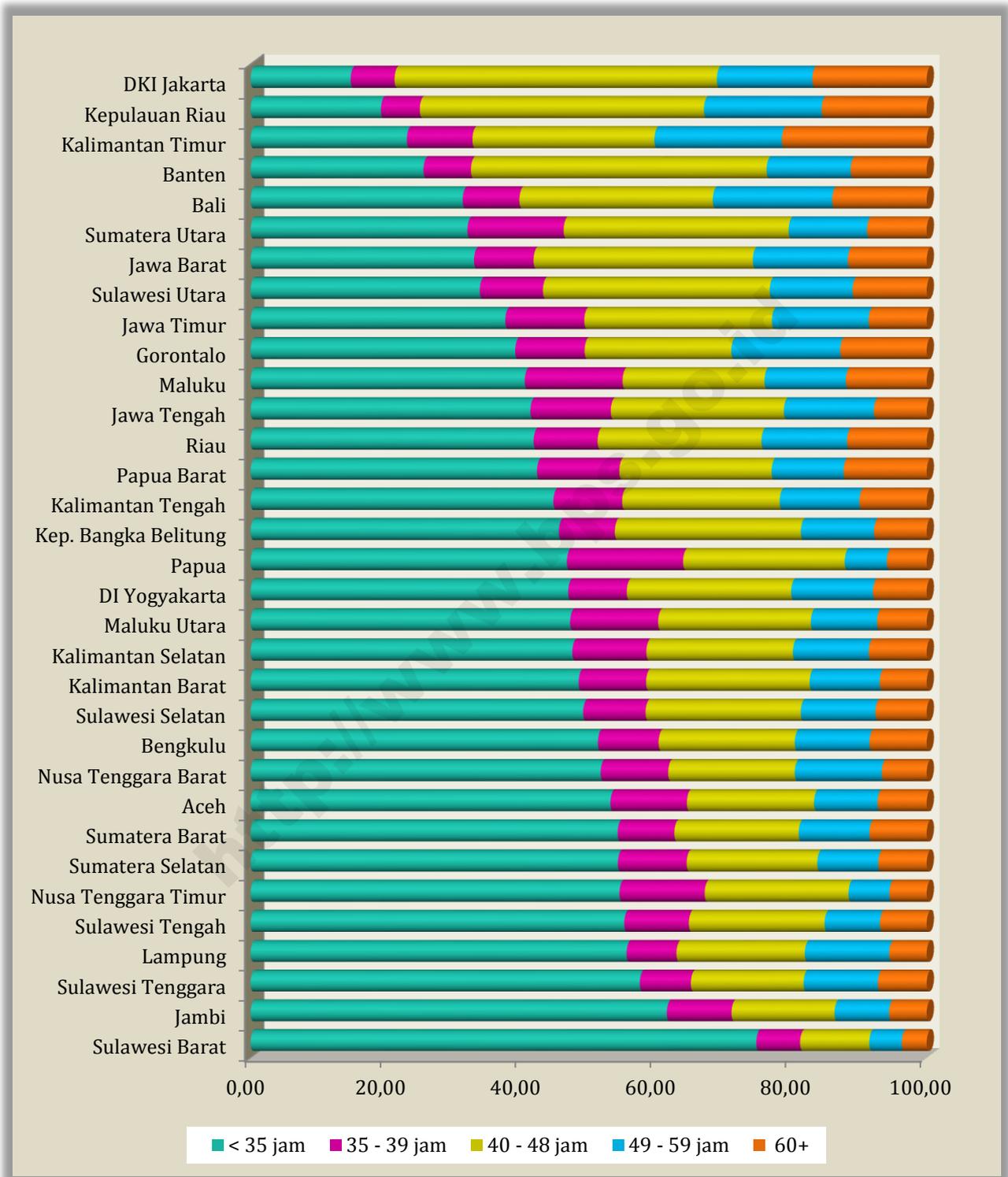
Jumlah Jam Kerja	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,78	1,36	6,43
1–14 jam	3,98	3,85	4,92
15–24 jam	7,15	7,12	8,54
25–34 jam	9,34	9,31	8,28
35–39 jam	8,62	8,47	8,32
40–48 jam	37,11	37,62	35,53
49–59 jam	16,67	16,71	14,61
60 jam keatas	15,35	15,56	13,37
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,24	1,83	6,13
1–14 jam	8,20	7,49	10,44
15–24 jam	15,33	15,83	17,71
25–34 jam	17,74	17,91	15,84
35–39 jam	11,59	11,64	12,04
40–48 jam	23,17	23,53	20,76
49–59 jam	13,94	14,12	11,08
60 jam keatas	7,79	7,65	6,00

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Grafik 9 di bawah ini menunjukkan bahwa berdasarkan Sakernas Agustus 2013 tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (74,70 persen), Provinsi Jambi (61,49 persen) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (57,49 persen).

Sedangkan disisi sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (14,78 persen), Provinsi Kepulauan Riau (19,25 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (23,08 persen).

Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2013



4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa dari 110,80 juta orang yang bekerja, sebanyak 52,58 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (58,26 juta orang).

Berdasarkan hasil Sakernas pada periode Februari, Mei, dan Agustus 2013 tampak adanya sedikit fluktuasi persentase penduduk bekerja di sektor informal, di tengah usaha pemerintah

untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2013 sebesar 53,48 persen, naik tipis menjadi 53,56 persen pada Mei 2013 dan turun pada Agustus 2013 menjadi 52,58 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2013 mencapai 46,52 persen, turun menjadi 46,44 persen pada Mei 2013, dan meningkat pada Agustus 2013 mencapai 47,42 persen.

Apabila menyoroti komposisi menurut jenis kelamin, pada Agustus 2013 sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yaitu mencapai 65,95 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Mei dan Februari 2013 masing-masing mencapai 64,58 persen dan 64,59 persen.

Sementara itu, pada kelompok perempuan, dari total 41,59 juta orang yang bekerja terdapat sebanyak 23,70 juta orang (56,98 persen) yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 17,89 juta orang (43,02 persen) bekerja pada sektor formal.

Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013 (dalam juta)

Kategori Sektor	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	114,02	114,59	110,80
Laki-laki	70,21	70,70	69,21
Perempuan	43,81	43,89	41,59
Perkotaan	54,56	55,89	53,62
Perdesaan	59,46	58,70	57,18
Formal	53,04	53,21	52,54
Laki-laki	34,26	34,37	34,65
Perempuan	18,78	18,84	17,89
Perkotaan	34,85	35,63	35,54
Perdesaan	18,19	17,58	17,00
Informal	60,98	61,38	58,26
Laki-laki	35,95	36,33	34,56
Perempuan	25,03	25,05	23,70
Perkotaan	19,71	20,26	18,08
Perdesaan	41,27	41,12	40,18

Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013

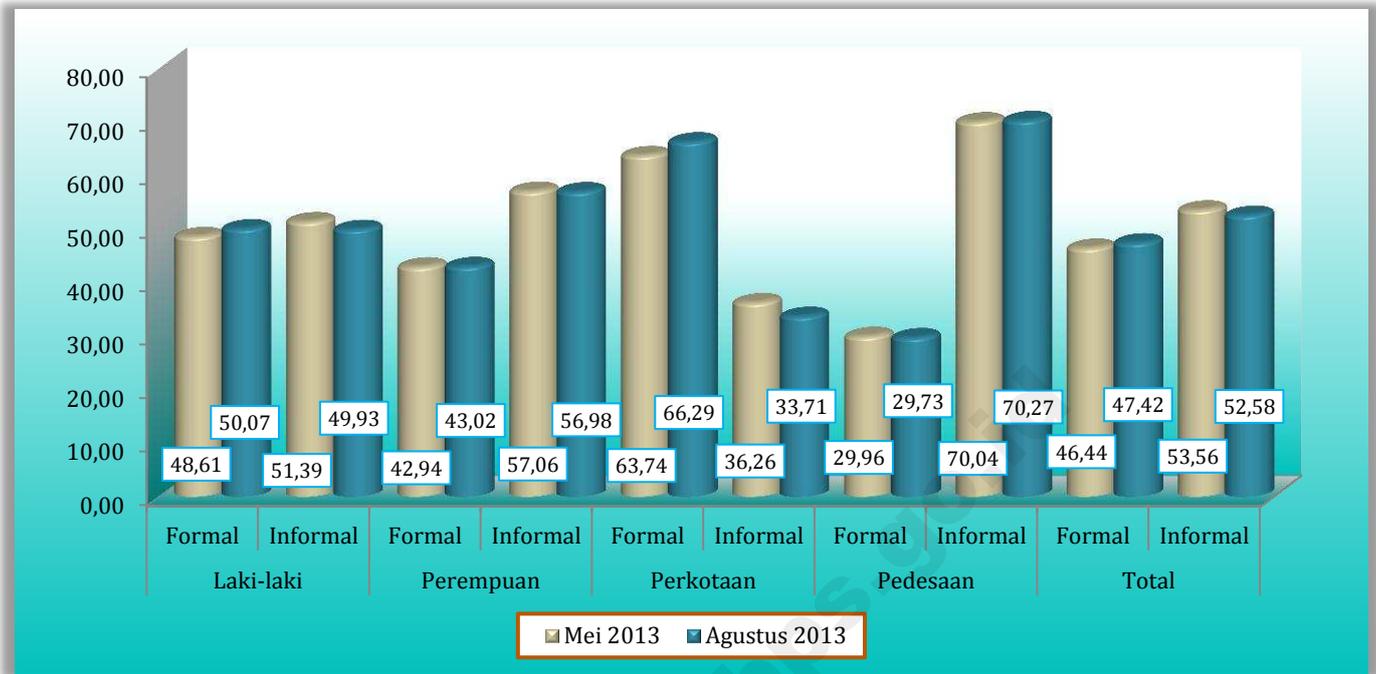
Kategori Sektor	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Formal+Informal	100,00	100,00	100,00
Formal	46,52	46,44	47,42
Informal	53,48	53,56	52,58
Formal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	64,59	64,58	65,95
Perempuan	35,41	35,42	34,05
Perkotaan	65,70	66,95	67,64
Perdesaan	34,30	33,05	32,36
Informal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	58,95	59,20	59,32
Perempuan	41,05	40,80	40,68
Perkotaan	32,32	33,01	31,03
Perdesaan	67,68	66,99	68,97

Hasil Sakernas Agustus 2013 pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pada penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 67,64 persen. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 yang mencapai 66,95 persen (naik 0,69 persen poin), begitu pula bila dibandingkan Februari 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen poin. Sementara itu, di sisi lain persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, yang mengalami peningkatan bila dibanding keadaan Mei 2013 yaitu dari 66,99 persen pada Mei 2013 menjadi 68,97 persen pada Agustus 2013.

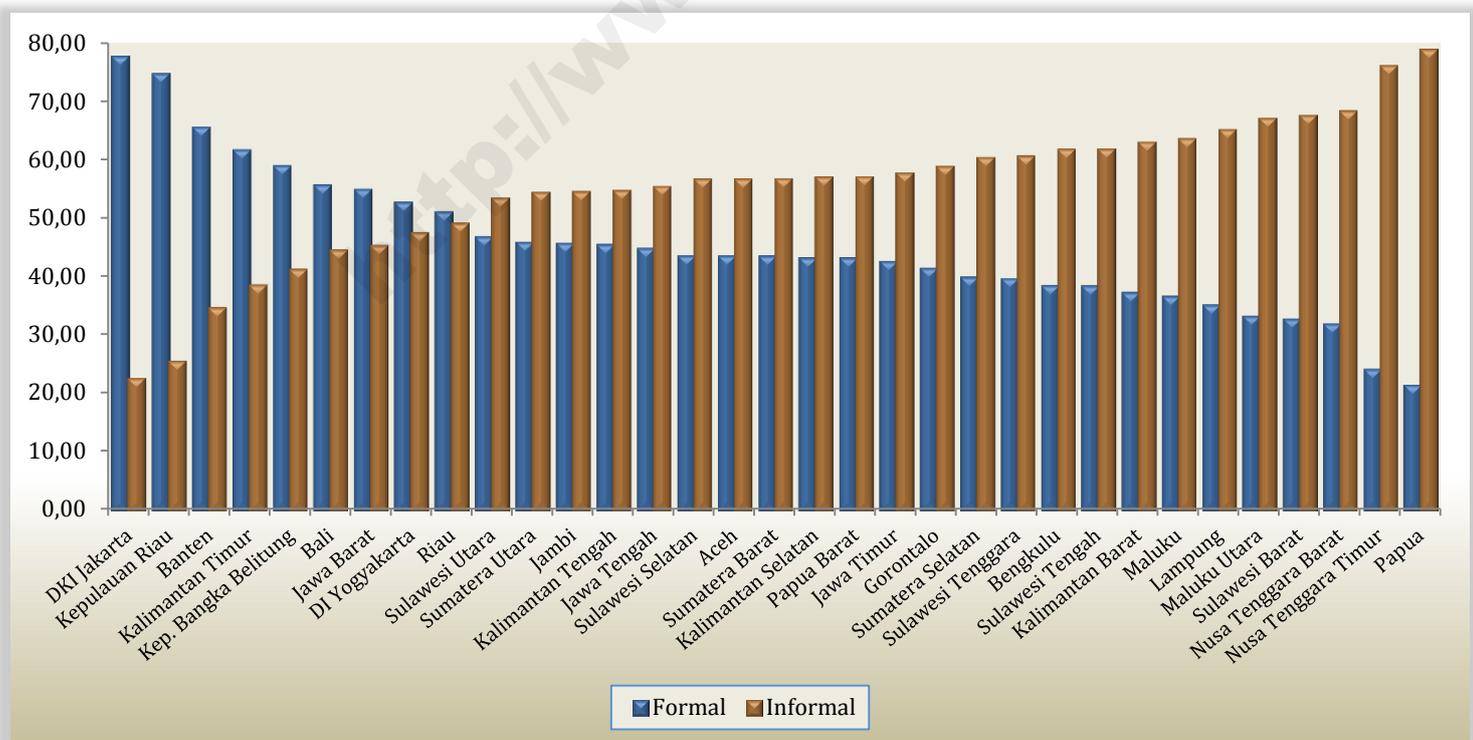
Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah, ternyata provinsi yang mendominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 11). Lima

peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, empat diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (77,60 persen), Kepulauan Riau (74,65 persen), Banten (65,48 persen) dan Kepulauan Bangka Belitung (58,92 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (61,61 persen). Sementara itu disisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi dengan penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (78,72 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (75,98 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (68,20 persen), Provinsi Sulawesi Barat (67,40 persen), dan Provinsi Maluku Utara (66,91 persen).

Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Mei dan Agustus 2013



Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Agustus 2013



5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 cenderung mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Mei maupun Februari 2013. TPT pada Agustus 2013 sebesar 6,25 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak

6 orang yang masuk kategori penganggur. Dari Tabel 12 menunjukkan bahwa TPT pada Agustus 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen poin bila dibandingkan Mei 2013 (5,81 persen), dan naik sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Februari 2013 (5,92 persen).

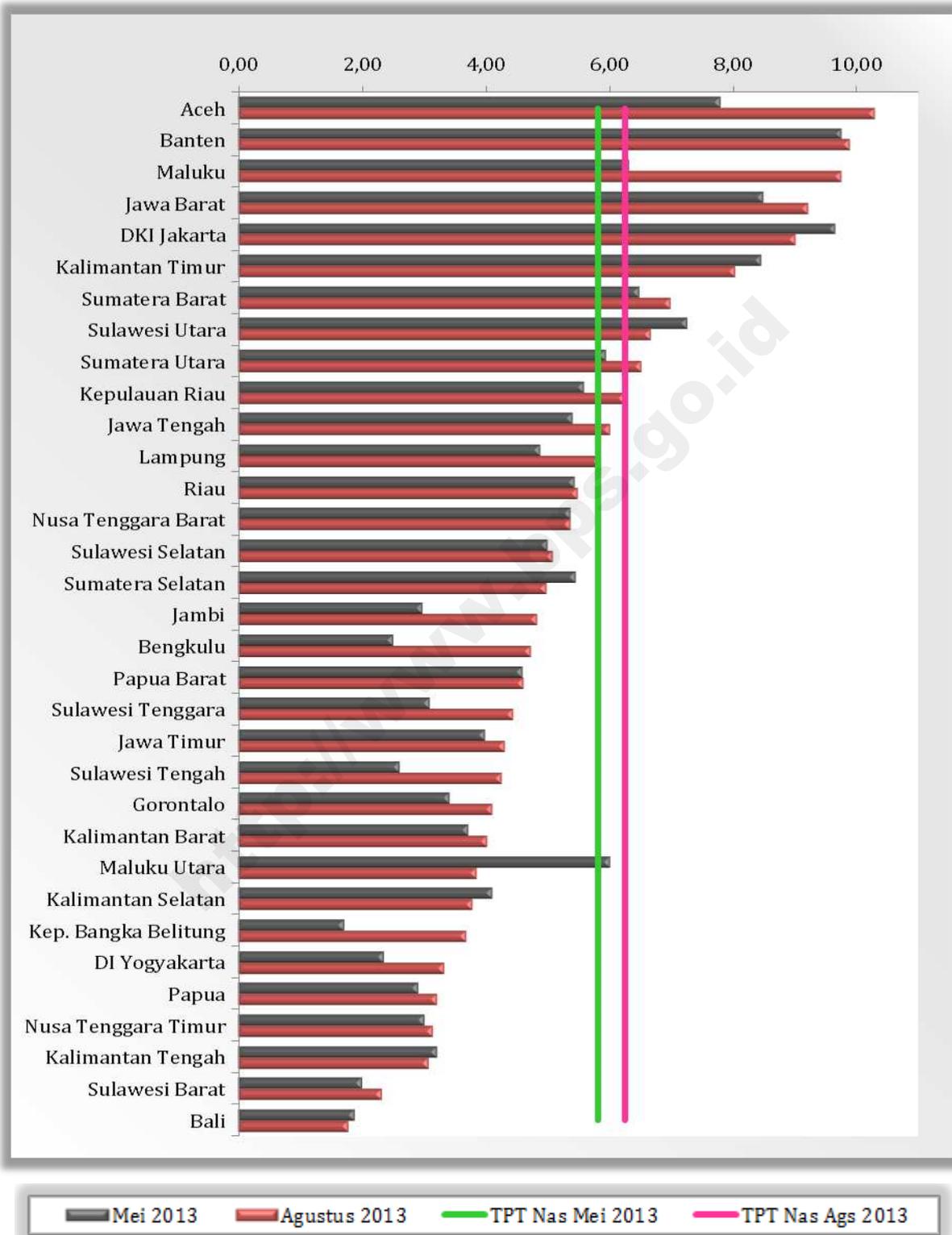
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2013
(persen)

TPT	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,92	5,81	6,25
Laki-laki	5,64	5,49	6,09
Perempuan	6,36	6,32	6,52
Perkotaan	7,30	7,15	7,41
Perdesaan	4,61	4,50	5,14

Seiring kenaikan TPT secara nasional, kenaikan juga terlihat baik pada masing-masing jenis kelamin, maupun berdasarkan wilayah tempat tinggal. Sebagai gambaran, TPT laki-laki pada Agustus 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen poin jika dibandingkan dengan Mei 2013 atau naik sebesar 0,45 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2013. Begitu pula TPT perempuan yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,20 persen

poin dan 0,16 persen poin bila dibandingkan dengan keadaan Mei maupun Februari 2013. Kenaikan TPT pada wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 0,26 persen poin dan 0,64 persen poin bila dibandingkan hasil Sakernas Mei 2013. Sementara itu, bila dibandingkan dengan Februari 2013, TPT daerah perkotaan naik sebesar 0,11 persen poin dan TPT daerah perdesaan naik sebesar 0,53 persen poin.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2013 (persen)



Masih merujuk pada hasil Sakernas Agustus 2013, TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Aceh (10,30 persen), Provinsi Banten (9,90 persen), dan Provinsi Maluku (9,75 persen). Sedangkan hasil Sakernas Mei 2013 posisi tersebut diduduki oleh Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dengan TPT masing-masing sebesar 9,76 persen, 9,65 persen, dan 8,49 persen. Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah diduduki oleh Provinsi Bali dengan TPT sebesar

1,79 persen, kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,33 persen, dan posisi ketiga diduduki Provinsi Kalimantan Tengah dengan TPT sebesar 3,09 persen. Sementara itu, pada Mei 2013 posisi ini diduduki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,72 persen, Provinsi Bali sebesar 1,90 persen, dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,02 persen (selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 12).

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013, TPT penduduk pada kelompok umur muda sebesar 21,64 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 22 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 3,62 persen poin bila dibandingkan dengan Mei 2013 (18,02 persen) atau naik sebesar 4,11 bila dibandingkan Februari 2013 (17,53 persen).

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, baik pada Mei maupun Februari 2013 menunjukkan bahwa TPT penduduk umur muda pada laki-laki

cenderung lebih tinggi daripada TPT pada perempuan, akan tetapi keadaan pada Agustus 2013 berbeda, yang menunjukkan bahwa TPT umur muda perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Agustus 2013 senantiasa mengalami kenaikan baik bila dibandingkan dengan Mei maupun Februari 2013 dengan kenaikan pada kelompok perempuan lebih tinggi daripada kelompok laki-laki. Seperti terlihat pada Tabel 13, TPT umur muda perempuan mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen poin bila dibandingkan dengan Mei 2013, sedangkan pada laki-laki kenaikan hanya mencapai 2,65 persen poin. Begitu pula bila dibanding keadaan Februari 2013. kenaikan pada perempuan mencapai 5,03 persen poin, sedangkan pada laki-laki naik sebesar 3,51 persen poin.

Ditinjau berdasarkan perbedaan daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Agustus 2013, TPT daerah perkotaan mencapai 23,43 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 19,81 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 23 orang yang

menganggur, sementara untuk daerah perdesaan hanya sekitar 20 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Agustus 2013 sebesar 7,21 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda tujuh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan kenaikan TPT umur muda pada Agustus 2013, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami kenaikan sebesar 1,69 poin bila dibanding Mei 2013 atau naik sebesar 2,14 poin dibanding Februari 2013. Jika dibedakan

menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan seperti ditunjukkan berdasarkan Sakernas Mei dan Februari 2013, namun sebaliknya bahwa pada Agustus 2013 rasio ini terlihat lebih tinggi pada kelompok perempuan daripada laki-laki. Sementara apabila dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013

Indikator	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Penduduk Umur Muda (%)	17,53	18,02	21,64
Laki-laki	17,80	18,66	21,31
Perempuan	17,11	17,00	22,14
Perkotaan	20,10	19,45	23,43
Perdesaan	15,10	16,54	19,81
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	5,07	5,52	7,21
Laki-laki	5,80	6,77	7,07
Perempuan	4,19	4,18	7,43
Perkotaan	4,38	4,32	6,02
Perdesaan	6,30	8,01	9,20
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur (%)	51,74	53,55	60,37
Laki-laki	54,99	58,42	58,86
Perempuan	47,16	46,81	62,72
Perkotaan	48,17	48,23	56,92
Perdesaan	57,08	61,84	65,17
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk Umur Muda (%)	8,77	8,92	10,45
Laki-laki	10,83	11,23	12,30
Perempuan	6,68	6,57	8,57
Perkotaan	9,79	9,38	10,98
Perdesaan	7,75	8,41	9,87

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 cukup tinggi yaitu 60,37 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2013, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 60 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun.

Seperti yang terlihat pada Tabel 13, angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,82 persen poin bila dibandingkan dengan Mei 2013 atau naik sebesar 8,63 persen poin bila dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2013.

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2013 sebesar 10,45 persen atau naik dari angka Mei 2013 yang mencapai 8,92 persen maupun Februari 2013 yang mencapai 8,77 persen. *Share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda yang mencapai 10,45 persen ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2013 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 10 orang diantaranya menganggur.

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa secara umum TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 10,27 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,47 persen.

Seiring dengan kenaikan TPT nasional periode Agustus 2013 dibandingkan dengan Mei 2013, kenaikan TPT menurut tingkat pendidikan terdapat pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan tinggi dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,94 persen poin dan 0,66 persen poin. Begitu pula indikator ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Sementara penurunan TPT terjadi pada kelompok tidak pernah sekolah dan tingkat sekolah dasar baik bila dibandingkan dengan keadaan Mei maupun Februari 2013.

Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPT pada tingkat pendidikan sekolah tinggi periode Agustus 2013 dibandingkan Mei 2013 tampak pada kelompok laki-laki maupun perempuan dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,02 persen poin dan 1,40 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa pada tingkat pendidikan dan periode yang sama, kenaikan terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,11 persen poin dan 0,51 persen poin.

Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 (persen)

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,92	5,81	6,25
Tidak Pernah Sekolah	2,01	2,34	1,47
Laki-laki	2,62	3,10	1,45
Perempuan	1,56	1,77	1,48
Perkotaan	5,31	5,13	3,76
Perdesaan	1,08	1,57	0,91
Sekolah Dasar	5,13	5,13	4,94
Laki-laki	4,96	4,91	4,99
Perempuan	5,40	5,49	4,86
Perkotaan	6,75	6,82	6,13
Perdesaan	4,11	4,03	4,20
Sekolah Menengah	8,78	8,33	10,27
Laki-laki	7,78	7,12	9,21
Perempuan	10,76	10,83	12,48
Perkotaan	9,12	8,55	9,91
Perdesaan	8,06	7,86	11,06
Sekolah Tinggi	5,22	4,99	5,65
Laki-laki	4,71	5,14	5,16
Perempuan	5,80	4,82	6,22
Perkotaan	5,08	5,20	5,71
Perdesaan	5,62	4,33	5,44

Secara keseluruhan pada periode Agustus 2013 dibandingkan dengan Mei 2013, kenaikan TPT terbesar terdapat pada tingkat pendidikan sekolah menengah untuk wilayah perdesaan dengan kenaikan sebesar 3,20 persen poin. Pada Mei 2013 TPT pada kelompok ini sebesar 7,86 persen, sedangkan pada Agustus 2013 meningkat menjadi 11,06 persen.

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan

seperti yang terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Berdasarkan data Sakernas baik pada Februari, Mei, maupun Agustus 2013 menunjukkan bahwa persentase penganggur terbanyak pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

Sebagai gambaran, pada Agustus 2013, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 47,34 persen yang mengalami penurunan sebesar 5,90 persen poin jika dibandingkan Mei 2013 (53,24 persen) atau turun sebesar 5,06 persen poin dibandingkan Februari 2013 (52,40 persen).

Selama periode Mei–Agustus 2013, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan juga terjadi pada mereka yang tidak pernah sekolah dengan penurunan sebesar 0,70 persen poin. Sementara pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi mengalami kenaikan sebesar 6,59 persen poin dan 0,01 persen poin.

Melihat lebih lanjut pada Tabel 15, baik pada keadaan Februari, Mei, maupun Agustus 2013, persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Agustus 2013, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 10,90 persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi hanya sebesar 6,95 persen.

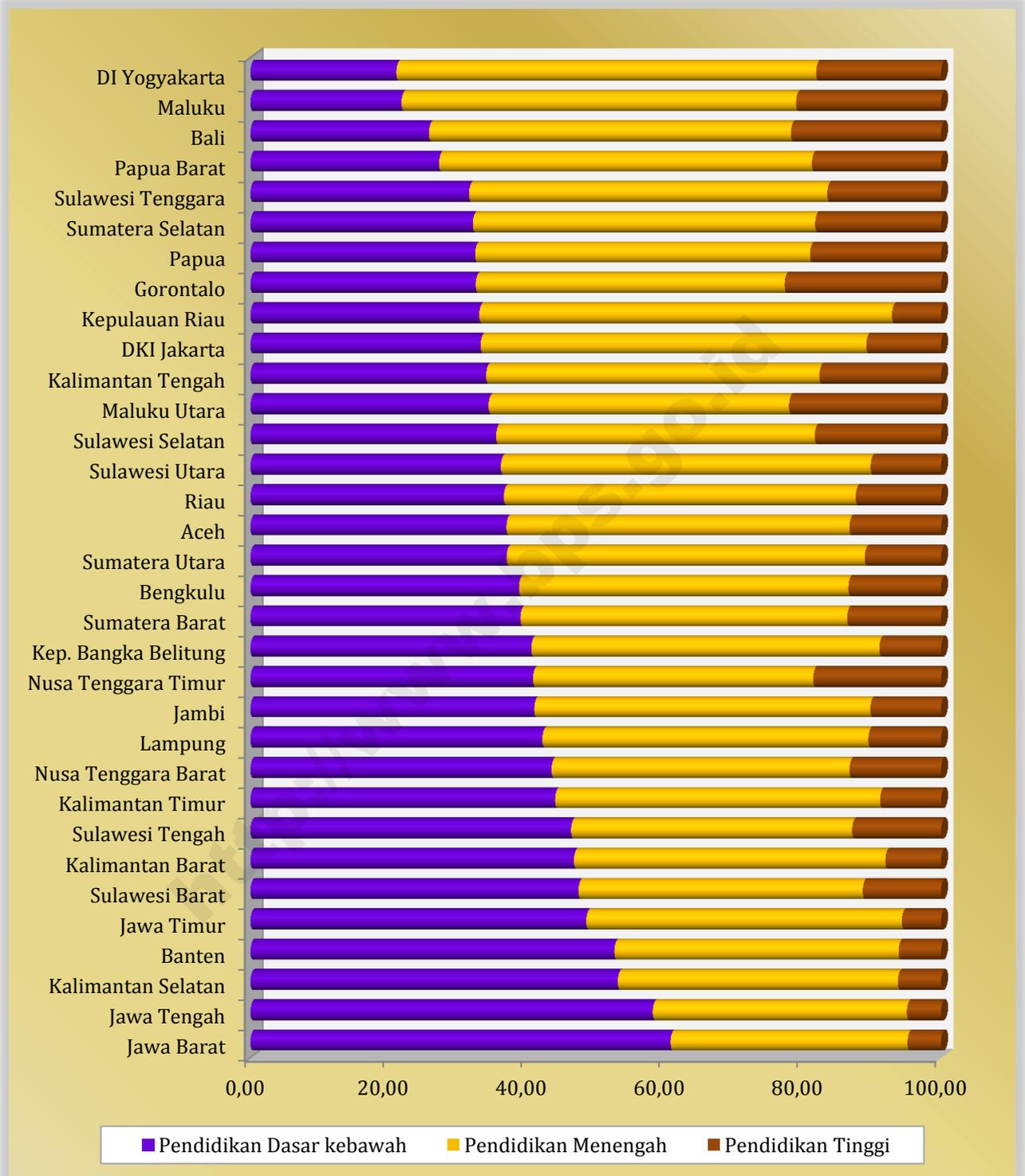
Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2013, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 15, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 1,24 persen dan 59,34 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 0,91 persen dan 38,70 persen.

Grafik 13 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah pada Agustus 2013 yaitu Provinsi Jawa Barat (60,78 persen), disusul oleh Provinsi Jawa Tengah (58,20 persen), dan Provinsi Kalimantan Selatan (53,14 persen) berada pada urutan ketiga. Sementara tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Gorontalo (22,69 persen), Maluku Utara (22,05 persen) dan Bali (21,77 persen).

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,53	1,75	1,05
Laki-laki	1,45	1,71	0,76
Perempuan	1,65	1,79	1,49
Perkotaan	1,49	1,36	0,91
Perdesaan	1,60	2,35	1,24
Sekolah Dasar	52,40	53,24	47,34
Laki-laki	53,65	54,15	49,34
Perempuan	50,64	51,98	44,25
Perkotaan	44,35	45,81	38,70
Perdesaan	64,45	64,81	59,34
Sekolah Menengah	37,50	36,52	43,11
Laki-laki	37,81	36,18	42,95
Perempuan	37,05	37,01	43,36
Perkotaan	43,80	41,81	49,04
Perdesaan	28,07	28,30	34,87
Sekolah Tinggi	8,57	8,49	8,50
Laki-laki	7,09	7,96	6,95
Perempuan	10,66	9,22	10,90
Perkotaan	10,36	11,02	11,35
Perdesaan	5,88	4,54	4,55

Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2013



5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Berdasarkan Sakernas Agustus 2013, jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 10,89 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 7,28 juta orang berjenis kelamin

laki-laki dan sisanya sebanyak 3,61 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Agustus 2013, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 7,44 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,45 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2013 (dalam juta)

Setengah Penganggur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	13,56	13,07	10,89
Laki-laki	7,70	7,36	7,28
Perempuan	5,86	5,71	3,61
Perkotaan	4,27	3,95	3,45
Perdesaan	9,29	9,12	7,44

Pada periode Sakernas Mei–Agustus 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 2,18 juta orang. Penurunan angka secara nasional ini diikuti penurunan jumlah setengah penganggur menurut jenis kelamin, dengan penurunan jumlah setengah penganggur pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, masing-masing sebanyak 2,10 juta orang dan 80 ribu orang. Penurunan juga terjadi baik di wilayah

perkotaan yang turun sejumlah 500 ribu orang, sedangkan di perdesaan penurunan jumlah setengah penganggur mencapai 1,68 juta orang.

Sementara itu, persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2013 mengalami penurunan baik bila dibandingkan dengan Mei maupun Februari 2013 seperti yang terlihat pada Tabel 17

berikut ini. Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2013 sebesar 9,22 persen atau turun 1,52 persen poin dibanding Mei 2013 (10,74 persen) dan turun 1,97 persen poin dibanding Februari 2013 (11,19 persen). Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa pada Februari maupun Mei 2013, dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sebanyak 11 orang setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2013 turun menjadi sekitar 9 orang setengah penganggur.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2013

Indikator	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	11,19	10,74	9,22
Laki-laki	10,35	9,84	9,88
Perempuan	12,53	12,20	8,11
Perkotaan	7,25	6,56	5,96
Perdesaan	14,91	14,85	12,35
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	11,89	11,41	9,83
Laki-laki	10,96	10,41	10,52
Perempuan	13,38	13,02	8,68
Perkotaan	7,82	7,06	6,44
Perdesaan	15,63	15,55	13,01

Sementara itu, persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja cenderung mengalami penurunan berdasarkan periode Sakernas Februari–Agustus 2013. Pada Februari 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja sebanyak 12 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Mei 2013 turun menjadi 11 orang, dan pada Agustus 2013 turun menjadi sejumlah 10 orang setengah penganggur per 100 orang penduduk

bekerja. Dilihat berdasarkan jenis kelamin selama periode Mei–Agustus 2013, penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja hanya terdapat pada kelompok perempuan sedangkan pada laki-laki terjadi kenaikan. Pada Mei 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja, terdapat 13 orang perempuan yang termasuk setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2013,

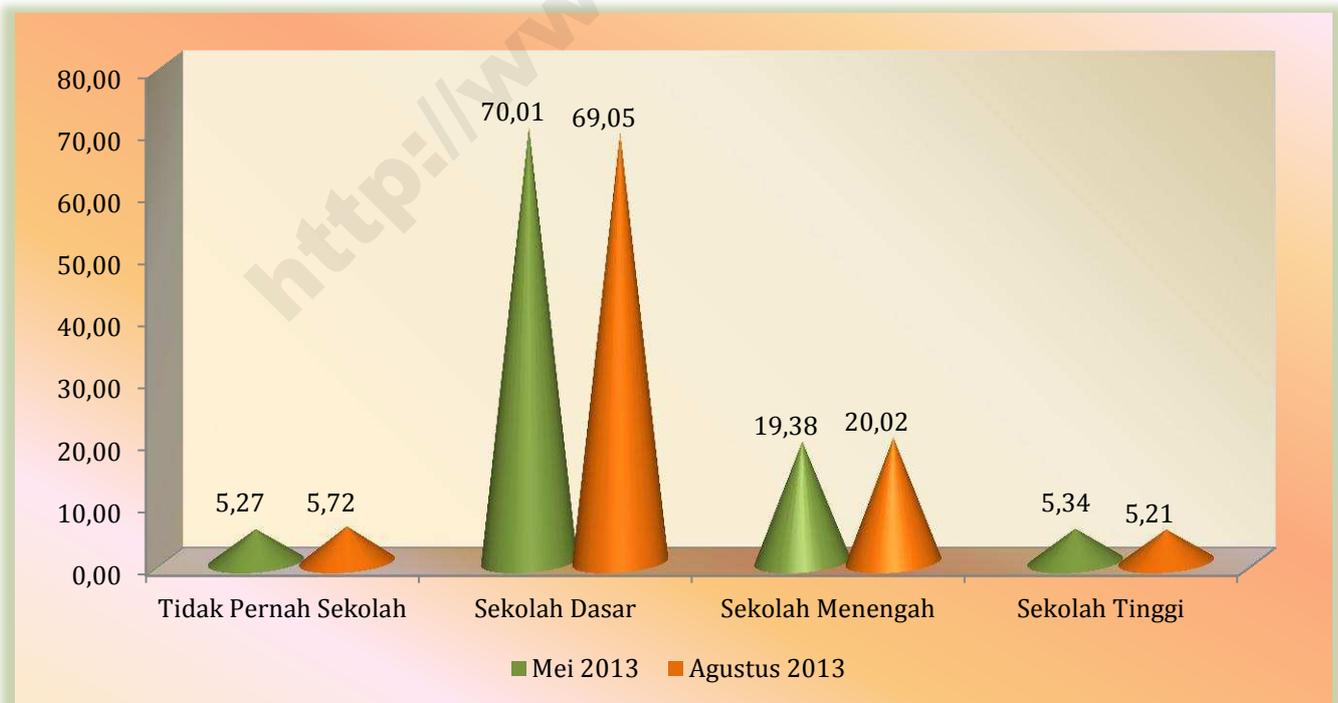
perempuan yang termasuk setengah penganggur turun menjadi sebanyak 9 orang.

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode Mei–Agustus 2013 penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Agustus 2013 dibandingkan Mei 2013, terjadi penurunan sebesar 2,54 persen poin di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan penurunan hanya mencapai 0,62 persen poin.

Masih merujuk pada hasil Sakernas Agustus 2013 (Grafik 14), penurunan persentase setengah penganggur menurut tingkat

pendidikan terjadi pada tingkat sekolah dasar yaitu sebesar 0,96 persen poin, dan pada tingkat pendidikan sekolah tinggi yang turun sebesar 0,13 persen poin (dibandingkan keadaan Mei 2013). Kemudian bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, penurunan hanya terjadi pada kelompok perempuan untuk tingkat sekolah dasar, sementara penurunan persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah tinggi hanya diikuti penurunan pada kelompok laki-laki. Sementara itu pada periode yang sama, kenaikan persentase setengah penganggur terbesar menurut tingkat pendidikan terdapat pada tingkat sekolah menengah yaitu 0,64 persen poin.

Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Mei dan Agustus 2013



Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	6,05	5,27	5,72
Laki-laki	4,32	3,71	4,21
Perempuan	8,32	7,27	8,76
Perkotaan	3,40	3,30	2,05
Perdesaan	7,26	6,11	7,42
Sekolah Dasar	68,69	70,01	69,05
Laki-laki	71,04	70,47	71,63
Perempuan	65,60	69,42	63,84
Perkotaan	59,95	59,01	60,52
Perdesaan	72,70	74,77	73,01
Sekolah Menengah	19,04	19,38	20,02
Laki-laki	20,29	21,67	20,46
Perempuan	17,40	16,44	19,12
Perkotaan	26,09	28,21	28,17
Perdesaan	15,80	15,57	16,24
Sekolah Tinggi	6,22	5,34	5,21
Laki-laki	4,35	4,15	3,70
Perempuan	8,68	6,87	8,28
Perkotaan	10,56	9,48	9,26
Perdesaan	4,24	3,55	3,33

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan di Indonesia adalah 33,10 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 33,10 persen.

Hasil Sakernas Februari, Mei dan Agustus 2013 menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan Mei 2013, tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,36 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 naik sebesar 2,31 persen poin. Seiring kenaikan tingkat ketidakaktifan juga diikuti kenaikan jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja, yaitu sebanyak 4,47 juta orang dari 54,00 juta orang pada Mei

2013 menjadi 58,47 juta orang pada Agustus 2013.

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 16 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 50 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, terjadi kenaikan tingkat ketidakaktifan baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,73 persen poin dan 2,98 persen poin.

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2013
(persen)

Tingkat ketidakaktifan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	30,79	30,74	33,10
Laki-laki	14,88	14,69	16,42
Perempuan	46,64	46,74	49,72
Perkotaan	33,04	32,62	35,56
Perdesaan	28,52	28,79	30,55

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Agustus 2013 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 35,56 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 30,55 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perdesaan pada Agustus 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,76 persen poin bila dibandingkan keadaan Mei 2013. Begitu pula di daerah perkotaan juga mengalami peningkatan sebesar 2,94 persen poin, yaitu dari 32,62 persen pada Mei 2013 menjadi 35,56 persen pada Agustus 2013.

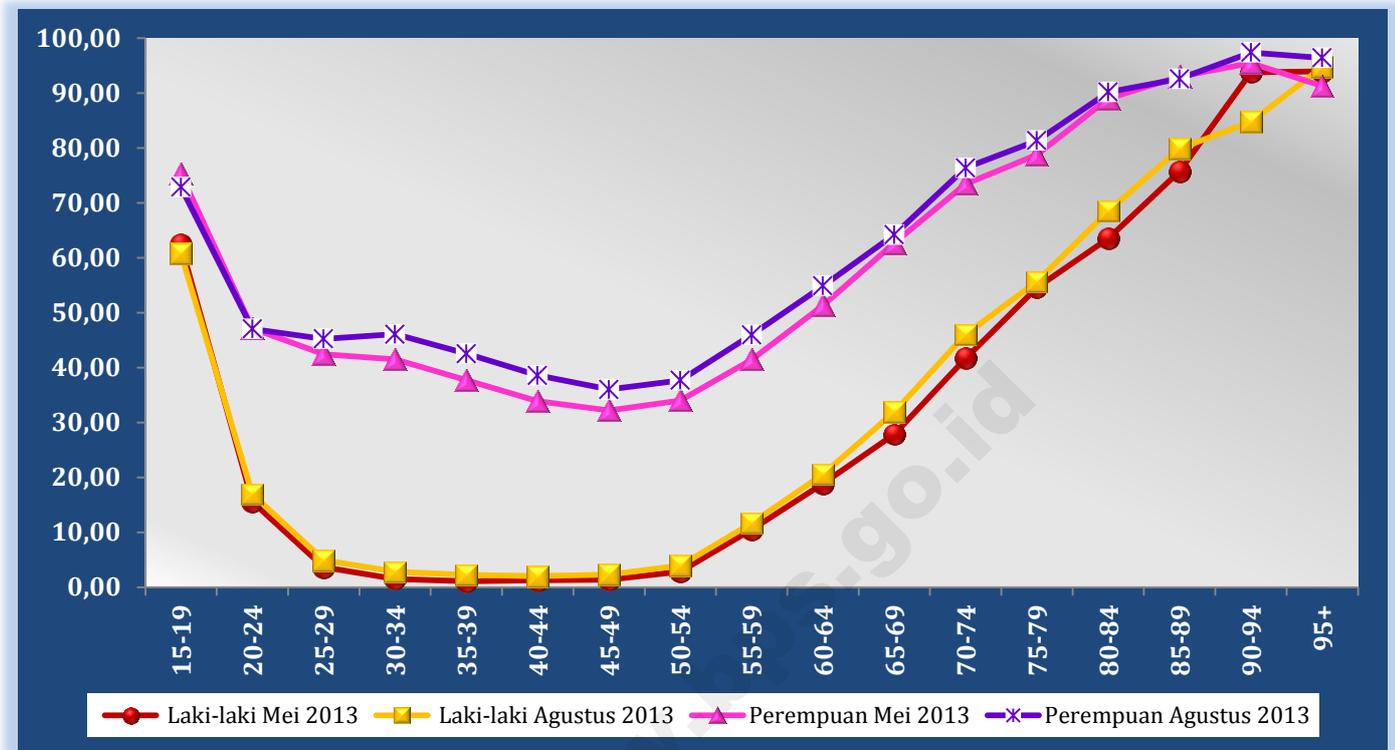
Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 15 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf "J").

Berdasarkan Grafik 15 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan

menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2013, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 60,82 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 2,01 persen pada kelompok umur (40–44) tahun. Tingkat ketidakaktifan laki-laki kembali meningkat dimulai pada kelompok umur (45–49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 72,84 persen. Kemudian pada kelompok umur (30–34) tahun, tingkat ketidakaktifan perempuan mulai terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45–49) tahun yaitu sebesar 36,00 persen. Tingkat ketidakaktifan perempuan kembali meningkat pada kelompok umur (50–54) tahun.

Grafik 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Mei dan Agustus 2013 (persen)



6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Mei 2013. Angkatan kerja pada Agustus 2013 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 59,89

persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,24 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,41 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,46 persen (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Agustus 2013, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 11,42 persen dibandingkan 8,20 persen.

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa pada kelompok usia muda, baik pada Mei maupun Agustus 2013, persentase angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (mencapai 50 persen lebih), kemudian disusul pada jenjang sekolah menengah.

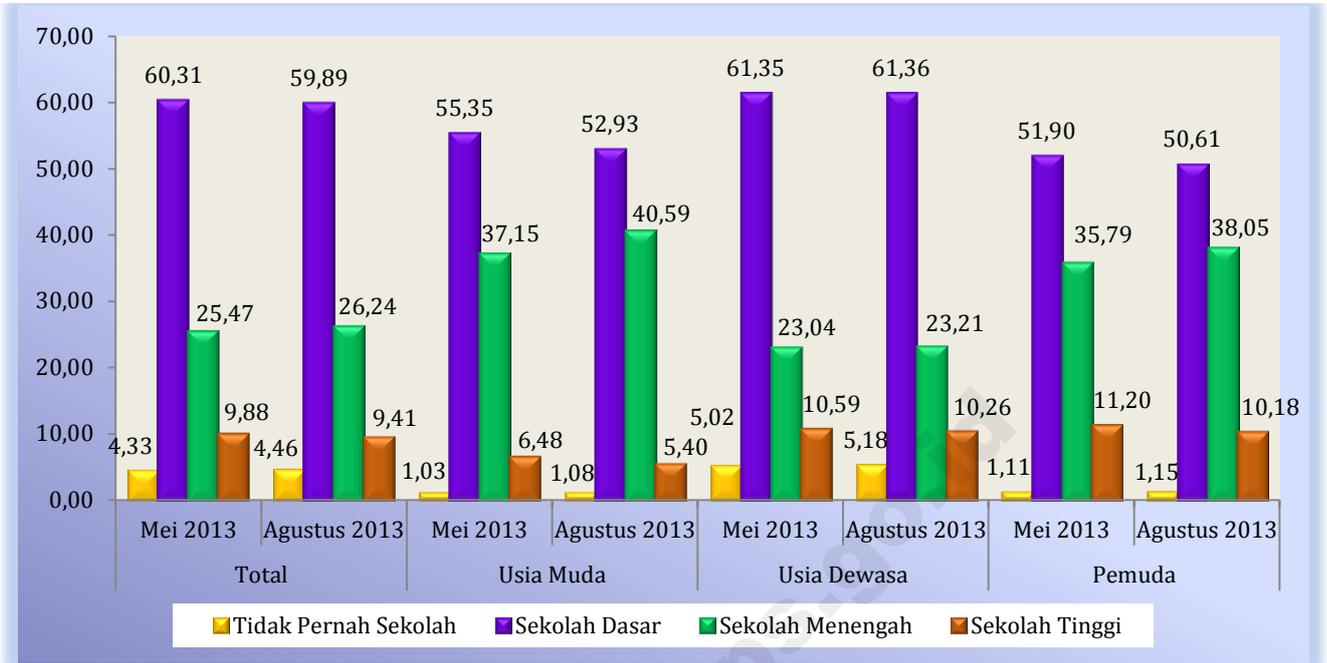
Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda yaitu angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Sementara itu, seperti tampak pada Grafik 17, pada Agustus 2013, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar kebawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

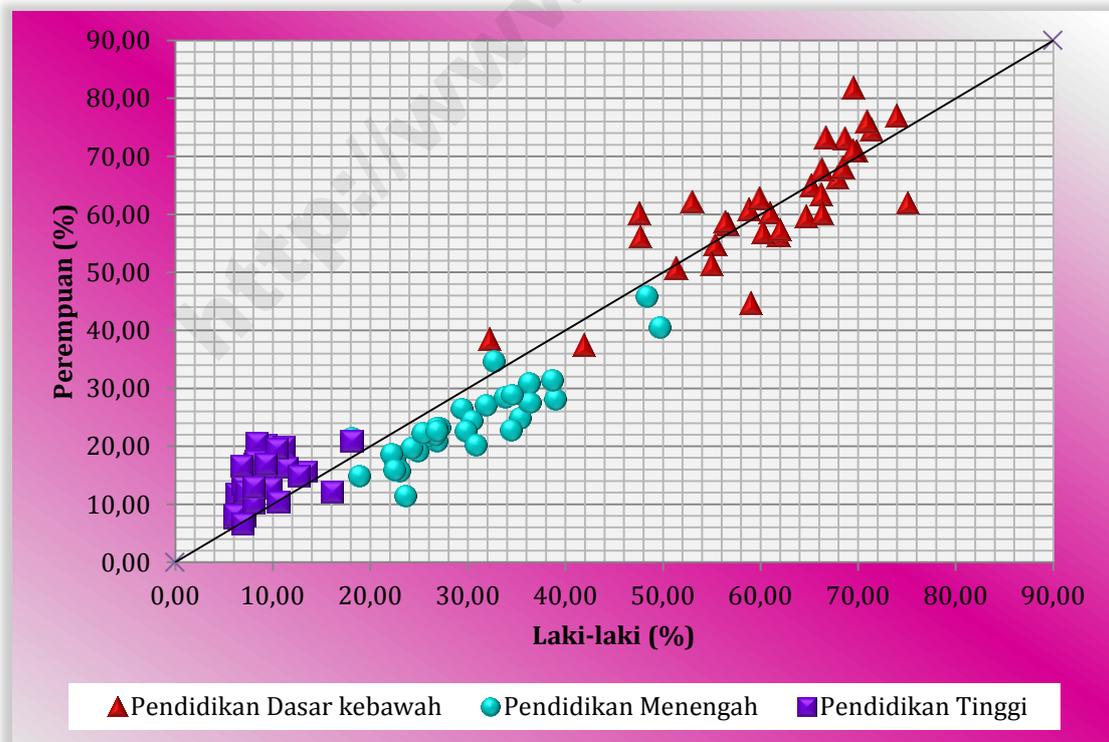
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,52	4,33	4,46
Laki-laki	3,11	3,04	3,19
Perempuan	6,75	6,39	6,57
Perkotaan	2,04	1,89	1,80
Perdesaan	6,85	6,72	7,02
Sekolah Dasar	60,48	60,31	59,89
Laki-laki	61,01	60,57	60,20
Perempuan	59,65	59,90	59,36
Perkotaan	48,00	48,00	46,78
Perdesaan	72,27	72,37	72,48
Sekolah Menengah	25,28	25,47	26,24
Laki-laki	27,40	27,90	28,41
Perempuan	21,91	21,61	22,65
Perkotaan	35,06	34,95	36,69
Perdesaan	16,05	16,19	16,20
Sekolah Tinggi	9,72	9,89	9,41
Laki-laki	8,48	8,49	8,20
Perempuan	11,69	12,10	11,42
Perkotaan	14,90	15,16	14,73
Perdesaan	4,83	4,72	4,30

Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2013



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2013



<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013
(dalam ribu)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 599	1 637	3 236	1 608	1 646	3 253	1 619	1 658	3 277
Sumatera Utara	4 365	4 507	8 872	4 374	4 515	8 889	4 394	4 537	8 931
Sumatera Barat	1 656	1 744	3 399	1 660	1 749	3 408	1 669	1 757	3 426
Riau	2 088	1 963	4 051	2 105	1 979	4 084	2 127	2 000	4 127
Jambi	1 167	1 119	2 286	1 173	1 126	2 299	1 183	1 135	2 318
Sumatera Selatan	2 751	2 677	5 428	2 762	2 687	5 449	2 780	2 704	5 484
Bengkulu	631	607	1 238	633	609	1 242	637	612	1 249
Lampung	2 840	2 677	5 516	2 847	2 683	5 530	2 861	2 696	5 557
Kep. Bangka Belitung	487	446	933	490	449	940	495	454	949
Kepulauan Riau	690	656	1 346	698	664	1 361	707	673	1 380
DKI Jakarta	3 810	3 735	7 545	3 821	3 746	7 567	3 842	3 766	7 608
Jawa Barat	16 142	15 709	31 852	16 207	15 772	31 979	16 314	15 877	32 191
Jawa Tengah	11 754	12 193	23 947	11 756	12 195	23 952	11 790	12 230	24 020
DI Yogyakarta	1 346	1 410	2 756	1 349	1 412	2 761	1 355	1 419	2 774
Jawa Timur	13 970	14 688	28 658	13 987	14 705	28 692	14 040	14 762	28 802
Banten	4 068	3 911	7 980	4 093	3 936	8 029	4 130	3 970	8 100
Bali	1 517	1 520	3 037	1 524	1 527	3 051	1 535	1 538	3 073
Nusa Tenggara Barat	1 502	1 676	3 178	1 505	1 680	3 185	1 513	1 688	3 200
Nusa Tenggara Timur	1 500	1 585	3 085	1 507	1 592	3 099	1 517	1 602	3 120
Kalimantan Barat	1 557	1 494	3 051	1 559	1 496	3 055	1 566	1 502	3 068
Kalimantan Tengah	836	757	1 593	839	760	1 599	844	765	1 609
Kalimantan Selatan	1 354	1 341	2 695	1 360	1 347	2 707	1 369	1 356	2 725
Kalimantan Timur	1 442	1 272	2 715	1 455	1 283	2 738	1 472	1 297	2 769
Sulawesi Utara	857	829	1 685	859	831	1 689	863	835	1 698
Sulawesi Tengah	943	900	1 843	947	904	1 851	953	910	1 863
Sulawesi Selatan	2 715	2 979	5 694	2 721	2 985	5 706	2 734	3 000	5 734
Sulawesi Tenggara	755	769	1 524	759	772	1 531	764	778	1 541
Gorontalo	371	376	747	373	377	750	376	380	755
Sulawesi Barat	392	400	791	394	402	796	397	406	803
Maluku	524	525	1 049	527	528	1 056	532	533	1 065
Maluku Utara	362	348	710	364	350	714	367	352	719
Papua Barat	294	256	550	297	258	555	298	260	558
Papua	1 117	994	2 110	1 130	1 007	2 137	1 146	1 019	2 165
Indonesia	87 401	87 698	175 099	87 682	87 972	175 654	88 189	88 473	176 662

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013
(dalam juta)

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun keatas	175,10	175,66	176,66
Laki-laki	87,40	87,68	88,19
Perempuan	87,70	87,97	88,47
Perkotaan	87,89	89,33	89,87
Perdesaan	87,21	86,32	86,79
(15–24)	42,31	42,45	42,71
Laki-laki	21,28	21,35	21,48
Perempuan	21,03	21,10	21,23
Perkotaan	21,15	22,12	22,26
Perdesaan	21,16	20,33	20,45
(15–64)	163,18	163,92	164,24
Laki-laki	82,12	82,52	82,62
Perempuan	81,06	81,40	81,61
Perkotaan	82,14	84,05	84,22
Perdesaan	81,04	79,86	80,02
(25–54)	105,48	105,82	106,44
Laki-laki	53,03	53,20	53,52
Perempuan	52,45	52,62	52,92
Perkotaan	53,21	54,37	54,70
Perdesaan	52,27	51,46	51,74
(25–34)	42,71	42,86	43,12
Laki-laki	21,37	21,45	21,58
Perempuan	21,34	21,41	21,54
Perkotaan	21,67	22,55	22,69
Perdesaan	21,04	20,31	20,43
(35–54)	62,77	62,96	63,32
Laki-laki	31,66	31,76	31,94
Perempuan	31,11	31,21	31,38
Perkotaan	31,54	31,82	32,01
Perdesaan	31,23	31,14	31,31
(55–64)	15,39	15,64	15,09
Laki-laki	7,81	7,96	7,63
Perempuan	7,58	7,68	7,46
Perkotaan	7,78	7,56	7,26
Perdesaan	7,61	8,08	7,83
65 Tahun keatas	11,92	11,74	12,43
Laki-laki	5,28	5,17	5,56
Perempuan	6,64	6,57	6,86
Perkotaan	5,75	5,28	5,65
Perdesaan	6,17	6,46	6,77

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013
(dalam ribu)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 320	802	2 122	1 313	797	2 110	1 294	740	2 034
Sumatera Utara	3 737	2 715	6 452	3 743	2 711	6 454	3 767	2 545	6 312
Sumatera Barat	1 400	990	2 391	1 406	982	2 387	1 321	835	2 156
Riau	1 819	997	2 816	1 823	940	2 763	1 771	855	2 626
Jambi	996	586	1 582	1 011	553	1 564	981	472	1 453
Sumatera Selatan	2 350	1 555	3 905	2 340	1 579	3 919	2 290	1 357	3 647
Bengkulu	551	369	920	548	357	905	524	317	841
Lampung	2 467	1 419	3 886	2 479	1 463	3 942	2 394	1 202	3 596
Kep. Bangka Belitung	429	234	663	429	221	651	425	195	620
Kepulauan Riau	606	343	949	607	347	954	605	300	905
DKI Jakarta	3 167	1 997	5 164	3 230	2 028	5 258	3 232	1 948	5 180
Jawa Barat	13 795	6 593	20 389	13 929	6 945	20 874	13 652	6 633	20 285
Jawa Tengah	9 897	7 012	16 910	10 021	6 951	16 972	9 928	7 059	16 987
DI Yogyakarta	1 067	842	1 909	1 068	866	1 933	1 051	860	1 911
Jawa Timur	11 902	8 194	20 096	11 819	8 118	19 938	11 936	8 201	20 138
Banten	3 525	1 951	5 476	3 561	1 914	5 475	3 429	1 718	5 146
Bali	1 296	1 100	2 396	1 295	1 086	2 381	1 287	1 028	2 315
Nusa Tenggara Barat	1 263	973	2 235	1 275	938	2 213	1 219	876	2 095
Nusa Tenggara Timur	1 261	1 051	2 312	1 269	973	2 242	1 225	919	2 144
Kalimantan Barat	1 333	892	2 224	1 351	875	2 225	1 311	829	2 140
Kalimantan Tengah	731	426	1 157	724	412	1 135	723	374	1 098
Kalimantan Selatan	1 165	772	1 937	1 181	739	1 920	1 168	715	1 883
Kalimantan Timur	1 281	609	1 889	1 319	612	1 931	1 248	518	1 766
Sulawesi Utara	726	364	1 089	726	376	1 102	702	313	1 015
Sulawesi Tengah	825	497	1 323	829	477	1 306	811	417	1 228
Sulawesi Selatan	2 247	1 373	3 620	2 254	1 416	3 670	2 200	1 268	3 468
Sulawesi Tenggara	636	424	1 060	642	429	1 070	625	389	1 014
Gorontalo	311	170	480	319	190	509	308	161	468
Sulawesi Barat	333	240	573	339	249	588	331	205	536
Maluku	429	285	714	424	285	709	414	250	663
Maluku Utara	306	176	482	304	174	478	302	161	463
Papua Barat	237	138	375	240	138	378	239	132	371
Papua	989	705	1 694	987	711	1 698	992	697	1 689
Indonesia	74 399	46 793	121 192	74 803	46 852	121 655	73 705	44 488	118 193

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umur, 2013
(dalam juta)

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun keatas	121,19	121,66	118,19
Laki-laki	74,40	74,80	73,70
Perempuan	46,79	46,85	44,49
Perkotaan	58,85	60,19	57,91
Perdesaan	62,34	61,47	60,28
(15–24)	21,16	21,01	20,62
Laki-laki	12,95	12,86	12,40
Perempuan	8,21	8,15	8,22
Perkotaan	10,30	10,67	10,43
Perdesaan	10,86	10,34	10,19
(15–64)	116,48	116,97	113,55
Laki-laki	71,50	71,86	70,73
Perempuan	44,98	45,12	42,81
Perkotaan	57,01	58,51	56,22
Perdesaan	59,47	58,46	57,33
(25–54)	84,54	84,97	82,75
Laki-laki	51,83	52,16	51,89
Perempuan	32,72	32,81	30,85
Perkotaan	41,84	43,08	41,44
Perdesaan	42,70	41,89	41,31
(25–34)	33,22	33,31	32,46
Laki-laki	20,77	20,89	20,76
Perempuan	12,45	12,42	11,70
Perkotaan	16,82	17,61	16,99
Perdesaan	16,40	15,70	15,47
(35–54)	51,33	51,66	50,29
Laki-laki	31,06	31,28	31,13
Perempuan	20,27	20,39	19,15
Perkotaan	25,02	25,47	24,45
Perdesaan	26,31	26,19	25,84
(55–64)	10,78	10,99	10,19
Laki-laki	6,73	6,84	6,44
Perempuan	4,05	4,15	3,75
Perkotaan	4,86	4,76	4,36
Perdesaan	5,91	6,23	5,83
65 Tahun keatas	4,71	4,68	4,64
Laki-laki	2,90	2,95	2,97
Perempuan	1,82	1,74	1,67
Perkotaan	1,85	1,68	1,69
Perdesaan	2,87	3,00	2,95

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013
(persen)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	82,53	48,98	65,56	81,64	48,43	64,84	79,93	44,63	62,07
Sumatera Utara	85,62	60,24	72,72	85,57	60,05	72,60	85,71	56,10	70,67
Sumatera Barat	84,58	56,79	70,32	84,68	56,14	70,04	79,19	47,51	62,94
Riau	87,12	50,78	69,51	86,61	47,49	67,65	83,27	42,73	63,62
Jambi	85,35	52,37	69,21	86,17	49,10	68,02	82,92	41,55	62,66
Sumatera Selatan	85,40	58,10	71,94	84,73	58,76	71,92	82,36	50,20	66,50
Bengkulu	87,29	60,85	74,33	86,58	58,64	72,89	82,28	51,75	67,32
Lampung	86,87	53,00	70,44	87,07	54,53	71,29	83,66	44,58	64,70
Kep. Bangka Belitung	88,12	52,49	71,08	87,57	49,24	69,24	85,82	42,96	65,32
Kepulauan Riau	87,90	52,27	70,53	87,01	52,33	70,10	85,55	44,60	65,58
DKI Jakarta	83,13	53,46	68,44	84,53	54,14	69,49	84,13	51,72	68,09
Jawa Barat	85,46	41,97	64,01	85,94	44,04	65,27	83,68	41,78	63,01
Jawa Tengah	84,20	57,51	70,61	85,23	57,00	70,86	84,21	57,72	70,72
DI Yogyakarta	79,29	59,71	69,27	79,15	61,29	70,02	77,53	60,64	68,89
Jawa Timur	85,20	55,78	70,12	84,50	55,21	69,49	85,02	55,56	69,92
Banten	86,64	49,89	68,62	87,00	48,63	68,19	83,03	43,26	63,53
Bali	85,45	72,38	78,91	84,95	71,13	78,03	83,88	66,83	75,35
Nusa Tenggara Barat	84,07	58,04	70,35	84,71	55,85	69,49	80,57	51,88	65,44
Nusa Tenggara Timur	84,06	66,33	74,95	84,17	61,14	72,34	80,72	57,35	68,72
Kalimantan Barat	85,60	59,68	72,91	86,63	58,46	72,84	83,73	55,19	69,75
Kalimantan Tengah	87,44	56,27	72,63	86,24	54,15	70,99	85,67	48,94	68,21
Kalimantan Selatan	86,06	57,57	71,88	86,82	54,88	70,93	85,29	52,72	69,08
Kalimantan Timur	88,78	47,86	69,60	90,67	47,71	70,54	84,81	39,95	63,79
Sulawesi Utara	84,70	43,88	64,63	84,58	45,23	65,23	81,34	37,45	59,76
Sulawesi Tengah	87,57	55,27	71,79	87,57	52,76	70,57	85,12	45,83	65,92
Sulawesi Selatan	82,77	46,08	63,58	82,83	47,44	64,31	80,47	42,27	60,49
Sulawesi Tenggara	84,24	55,19	69,58	84,59	55,51	69,92	81,85	50,03	65,79
Gorontalo	83,75	45,16	64,33	85,65	50,32	67,88	81,96	42,26	62,00
Sulawesi Barat	85,09	59,99	72,41	86,01	61,93	73,84	83,44	50,56	66,82
Maluku	81,90	54,32	68,09	80,45	53,86	67,13	77,78	46,89	62,31
Maluku Utara	84,50	50,62	67,90	83,53	49,66	66,94	82,29	45,72	64,38
Papua Barat	80,69	53,95	68,25	81,07	53,52	68,26	80,14	50,67	66,41
Papua	88,56	70,92	80,25	87,32	70,61	79,45	86,61	68,34	78,01
Indonesia	85,12	53,36	69,21	85,31	53,26	69,26	83,58	50,28	66,90

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013
(dalam ribu)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 224	719	1 944	1 229	716	1 945	1 177	648	1 825
Sumatera Utara	3 553	2 511	6 064	3 562	2 507	6 069	3 553	2 346	5 900
Sumatera Barat	1 319	920	2 239	1 321	911	2 232	1 230	776	2 006
Riau	1 758	941	2 699	1 749	863	2 612	1 691	790	2 481
Jambi	967	570	1 536	982	535	1 517	941	441	1 382
Sumatera Selatan	2 236	1 455	3 691	2 238	1 468	3 705	2 168	1 297	3 465
Bengkulu	539	361	901	534	349	882	502	299	801
Lampung	2 366	1 322	3 688	2 395	1 354	3 749	2 271	1 114	3 385
Kep. Bangka Belitung	416	225	641	424	216	639	411	186	597
Kepulauan Riau	577	311	888	589	311	901	581	268	849
DKI Jakarta	2 899	1 752	4 651	2 948	1 803	4 751	2 956	1 757	4 713
Jawa Barat	12 566	6 007	18 573	12 736	6 366	19 102	12 452	5 962	18 414
Jawa Tengah	9 359	6 609	15 968	9 495	6 558	16 053	9 324	6 640	15 964
DI Yogyakarta	1 031	806	1 837	1 047	841	1 888	1 012	835	1 847
Jawa Timur	11 442	7 850	19 291	11 361	7 779	19 140	11 402	7 864	19 266
Banten	3 164	1 759	4 923	3 215	1 726	4 941	3 085	1 552	4 637
Bali	1 271	1 080	2 351	1 269	1 066	2 335	1 260	1 014	2 274
Nusa Tenggara Barat	1 204	912	2 115	1 213	881	2 094	1 147	835	1 982
Nusa Tenggara Timur	1 242	1 025	2 266	1 233	941	2 174	1 192	884	2 076
Kalimantan Barat	1 294	861	2 156	1 306	836	2 142	1 256	797	2 054
Kalimantan Tengah	718	418	1 136	701	397	1 098	703	361	1 064
Kalimantan Selatan	1 124	738	1 862	1 134	707	1 841	1 122	689	1 811
Kalimantan Timur	1 170	552	1 722	1 209	559	1 768	1 156	468	1 624
Sulawesi Utara	688	323	1 011	689	333	1 022	665	282	947
Sulawesi Tengah	804	484	1 288	807	464	1 272	779	397	1 176
Sulawesi Selatan	2 140	1 269	3 409	2 167	1 319	3 486	2 093	1 198	3 291
Sulawesi Tenggara	617	406	1 024	621	416	1 037	602	367	969
Gorontalo	301	159	460	311	181	492	297	152	449
Sulawesi Barat	328	234	562	332	244	576	324	200	524
Maluku	404	262	666	402	262	664	378	221	599
Maluku Utara	295	161	456	293	156	449	294	151	445
Papua Barat	225	133	358	228	133	361	229	125	354
Papua	964	682	1 646	958	690	1 648	962	672	1 634
Indonesia	70 206	43 815	114 021	70 697	43 889	114 586	69 216	41 588	110 804

Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	76,56	43,94	60,06	76,44	43,51	59,78	72,69	39,07	55,68
Sumatera Utara	81,41	55,71	68,35	81,43	55,53	68,28	80,86	51,71	66,05
Sumatera Barat	79,70	52,75	65,88	79,57	52,13	65,49	73,70	44,14	58,54
Riau	84,21	47,96	66,64	83,10	43,61	63,97	79,51	39,49	60,12
Jambi	82,84	50,89	67,20	83,70	47,52	65,99	79,55	38,87	59,63
Sumatera Selatan	81,25	54,36	67,99	81,01	54,62	68,00	77,98	47,95	63,17
Bengkulu	85,42	59,58	72,76	84,29	57,26	71,05	78,78	48,87	64,13
Lampung	83,32	49,38	66,86	84,13	50,46	67,80	79,40	41,30	60,91
Kep. Bangka Belitung	85,48	50,47	68,74	86,40	48,02	68,05	83,05	40,92	62,91
Kepulauan Riau	83,70	47,44	66,02	84,48	46,93	66,18	82,11	39,80	61,48
DKI Jakarta	76,10	46,90	61,64	77,16	48,12	62,78	76,94	46,66	61,95
Jawa Barat	77,85	38,24	58,31	78,58	40,36	59,73	76,33	37,55	57,20
Jawa Tengah	79,62	54,21	66,68	80,77	53,77	67,02	79,09	54,29	66,46
DI Yogyakarta	76,56	57,17	66,64	77,59	59,53	68,36	74,66	58,87	66,58
Jawa Timur	81,90	53,44	67,32	81,23	52,90	66,71	81,21	53,27	66,89
Banten	77,77	44,97	61,70	78,54	43,85	61,54	74,70	39,10	57,25
Bali	83,80	71,05	77,42	83,26	69,85	76,55	82,08	65,93	74,00
Nusa Tenggara Barat	80,14	54,41	66,57	80,55	52,48	65,75	75,79	49,49	61,92
Nusa Tenggara Timur	82,75	64,64	73,45	81,77	59,14	70,15	78,54	55,18	66,54
Kalimantan Barat	83,13	57,66	70,66	83,76	55,89	70,11	80,23	53,08	66,94
Kalimantan Tengah	85,90	55,20	71,31	83,57	52,28	68,69	83,27	47,16	66,10
Kalimantan Selatan	82,99	55,01	69,07	83,38	52,49	68,01	81,96	50,82	66,46
Kalimantan Timur	81,12	43,37	63,43	83,09	43,58	64,58	78,55	36,09	58,66
Sulawesi Utara	80,35	38,93	59,98	80,21	40,11	60,49	77,04	33,77	55,77
Sulawesi Tengah	85,31	53,73	69,89	85,28	51,36	68,71	81,74	43,60	63,11
Sulawesi Selatan	78,81	42,60	59,87	79,63	44,20	61,09	76,57	39,93	57,40
Sulawesi Tenggara	81,71	52,89	67,17	81,82	53,93	67,75	78,88	47,13	62,86
Gorontalo	81,07	42,30	61,56	83,47	47,85	65,55	79,08	40,03	59,44
Sulawesi Barat	83,76	58,43	70,96	84,34	60,62	72,36	81,47	49,40	65,26
Maluku	77,21	49,85	63,51	76,31	49,50	62,89	71,13	41,38	56,24
Maluku Utara	81,45	46,15	64,16	80,51	44,58	62,91	80,17	42,87	61,90
Papua Barat	76,57	52,14	65,20	76,98	51,46	65,11	76,64	48,10	63,34
Papua	86,34	68,62	78,00	84,75	68,56	77,12	84,00	65,92	75,49
Indonesia	80,32	49,97	65,12	80,63	49,89	65,23	78,49	47,01	62,72

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	32,67	33,56	34,62	4,83	4,02	5,11	36,85	36,92	37,93
Sumatera Utara	32,60	32,32	36,45	3,58	3,88	3,44	34,37	34,92	31,23
Sumatera Barat	29,81	29,71	31,12	5,61	5,48	4,66	38,02	39,07	40,57
Riau	41,61	40,73	41,34	4,29	4,73	4,83	32,15	32,63	32,98
Jambi	35,34	35,84	37,13	4,60	5,20	4,35	33,14	34,78	38,21
Sumatera Selatan	30,83	29,86	33,30	3,17	2,57	2,70	37,55	37,32	37,21
Bengkulu	25,35	23,37	30,06	3,60	3,48	3,20	38,86	40,76	40,29
Lampung	25,03	25,53	25,75	3,51	3,23	3,47	38,98	37,47	39,29
Kep. Bangka Belitung	41,74	43,11	46,55	8,70	8,11	7,05	31,84	31,86	30,46
Kepulauan Riau	65,16	65,50	68,35	3,22	3,53	4,10	23,55	24,95	20,40
DKI Jakarta	69,99	68,81	67,29	3,61	4,36	3,67	19,31	20,57	20,16
Jawa Barat	43,99	42,54	43,31	3,43	3,78	3,36	29,91	29,14	30,10
Jawa Tengah	33,34	33,05	31,83	3,44	3,46	3,27	34,31	34,66	35,97
DI Yogyakarta	40,05	40,20	39,88	4,05	5,68	4,56	33,33	31,25	32,45
Jawa Timur	30,70	32,08	30,54	3,63	3,70	3,24	34,49	33,84	33,91
Banten	53,60	54,65	57,19	3,04	4,73	3,17	25,54	25,02	24,35
Bali	38,74	39,96	44,39	3,22	3,77	3,76	32,48	32,18	29,06
Nusa Tenggara Barat	21,33	23,31	21,89	2,93	2,84	2,62	41,67	39,23	39,51
Nusa Tenggara Timur	15,98	17,85	19,15	1,45	2,02	1,55	41,71	42,10	46,19
Kalimantan Barat	28,85	31,88	31,38	3,18	2,51	2,64	38,10	37,15	37,03
Kalimantan Tengah	35,01	38,34	38,00	2,86	2,58	3,23	36,76	35,26	37,71
Kalimantan Selatan	34,11	34,09	33,40	3,08	3,23	3,32	37,62	39,72	38,02
Kalimantan Timur	56,35	54,06	52,88	4,21	4,76	3,92	25,53	26,47	29,16
Sulawesi Utara	35,61	35,50	39,94	5,08	3,92	3,58	38,03	38,54	35,03
Sulawesi Tengah	28,14	27,07	29,06	3,25	4,84	3,81	40,72	38,07	40,58
Sulawesi Selatan	30,92	31,82	33,57	4,24	3,74	4,11	41,80	40,58	38,10
Sulawesi Tenggara	29,90	30,53	30,00	3,18	2,94	2,90	39,05	38,89	40,72
Gorontalo	33,26	31,25	32,33	4,47	3,30	3,35	41,12	42,73	42,47
Sulawesi Barat	22,54	21,77	25,03	2,53	1,64	1,76	43,92	45,55	45,38
Maluku	25,01	26,75	31,03	2,23	1,94	2,15	44,52	46,22	42,42
Maluku Utara	32,59	30,84	26,92	2,72	3,54	2,85	41,43	40,66	40,95
Papua Barat	35,91	36,65	36,23	1,73	1,62	2,02	35,57	38,58	38,14
Papua	16,95	18,29	17,51	1,27	1,58	1,25	42,39	41,16	42,79
Indonesia	36,45	36,63	37,03	3,53	3,73	3,39	33,78	33,53	33,73

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013
(lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan ^{*)}		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	7,63	5,56	6,00	18,01	19,94	16,34	62,50	62,42	60,27
Sumatera Utara	6,27	6,40	7,60	23,18	22,48	21,28	63,82	63,80	60,11
Sumatera Barat	10,50	9,85	9,65	16,05	15,88	14,00	64,57	64,80	64,22
Riau	7,33	7,64	6,47	14,61	14,27	14,38	54,10	54,55	53,83
Jambi	8,13	6,95	6,70	18,79	17,24	13,61	60,05	58,96	58,52
Sumatera Selatan	5,03	5,31	5,08	23,42	24,94	21,70	66,00	67,56	63,99
Bengkulu	5,92	7,58	6,18	26,28	24,81	20,27	71,05	73,15	66,74
Lampung	11,57	11,60	11,07	20,92	22,17	20,42	71,46	71,24	70,78
Kep. Bangka Belitung	4,13	4,11	4,83	13,59	12,81	11,11	49,56	48,78	46,40
Kepulauan Riau	2,36	1,54	3,00	5,71	4,49	4,16	31,62	30,97	27,55
DKI Jakarta	2,77	2,39	2,44	4,32	3,86	6,43	26,40	26,83	29,04
Jawa Barat	14,39	16,19	14,81	8,28	8,36	8,43	52,58	53,68	53,33
Jawa Tengah	15,15	14,92	12,26	13,76	13,91	16,67	63,22	63,50	64,90
DI Yogyakarta	8,99	8,23	7,08	13,59	14,64	16,03	55,90	54,12	55,56
Jawa Timur	12,30	12,56	12,51	18,87	17,82	19,80	65,67	64,22	66,22
Banten	9,68	8,17	9,75	8,13	7,43	5,53	43,36	40,62	39,64
Bali	9,68	9,18	9,22	15,87	14,91	13,57	58,04	56,27	51,85
Nusa Tenggara Barat	13,33	14,67	19,23	20,75	19,95	16,75	75,75	73,85	75,49
Nusa Tenggara Timur	4,14	4,69	3,11	36,72	33,34	29,99	82,57	80,12	79,29
Kalimantan Barat	2,91	3,99	4,30	26,96	24,47	24,65	67,97	65,61	65,99
Kalimantan Tengah	4,25	4,37	3,62	21,12	19,45	17,44	62,13	59,08	58,77
Kalimantan Selatan	5,75	6,27	7,31	19,44	16,70	17,95	62,81	62,69	63,28
Kalimantan Timur	2,13	3,56	4,64	11,78	11,14	9,40	39,44	41,17	43,20
Sulawesi Utara	10,08	11,56	12,51	11,20	10,49	8,94	59,31	60,58	56,47
Sulawesi Tengah	8,72	8,47	7,19	19,17	21,54	19,37	68,61	68,09	67,13
Sulawesi Selatan	4,35	5,64	5,86	18,69	18,22	18,35	64,84	64,44	62,32
Sulawesi Tenggara	3,24	3,50	4,42	24,62	24,14	21,97	66,92	66,53	67,10
Gorontalo	9,23	10,05	9,31	11,92	12,67	12,55	62,26	65,46	64,33
Sulawesi Barat	4,39	4,90	5,01	26,61	26,14	22,82	74,92	76,60	73,21
Maluku	1,57	1,60	3,22	26,67	23,50	21,18	72,76	71,32	66,82
Maluku Utara	4,36	5,51	5,25	18,90	19,45	24,04	64,69	65,62	70,23
Papua Barat	2,49	1,30	2,07	24,29	21,85	21,54	62,36	61,73	61,75
Papua	1,78	2,20	1,51	37,61	36,77	36,94	81,77	80,13	81,24
Indonesia	10,02	10,36	9,95	16,22	15,75	15,90	60,02	59,64	59,58

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	50,83	10,65	38,52	50,80	10,90	38,30	46,53	10,91	42,57
Sumatera Utara	49,39	11,72	38,89	48,62	11,69	39,69	43,45	14,67	41,88
Sumatera Barat	41,23	14,64	44,14	42,07	13,74	44,19	39,34	13,35	47,31
Riau	46,28	11,48	42,25	46,01	11,48	42,51	44,26	14,05	41,69
Jambi	54,19	9,11	36,70	51,90	7,42	40,68	52,37	10,16	37,47
Sumatera Selatan	52,96	11,50	35,53	55,53	11,98	32,49	54,69	10,43	34,88
Bengkulu	60,22	8,46	31,32	59,41	7,36	33,23	52,16	9,07	38,77
Lampung	49,61	12,14	38,25	52,17	11,43	36,40	51,46	13,24	35,29
Kep. Bangka Belitung	26,18	29,85	43,96	24,13	33,17	42,70	28,06	32,68	39,26
Kepulauan Riau	13,18	27,39	59,43	13,23	32,19	54,59	10,15	37,70	52,15
DKI Jakarta	1,07	17,85	81,08	1,43	17,38	81,19	0,33	18,77	80,90
Jawa Barat	19,61	28,97	51,43	21,27	28,13	50,60	19,93	29,24	50,83
Jawa Tengah	30,30	28,49	41,21	30,52	28,39	41,09	30,86	25,57	43,57
DI Yogyakarta	23,43	21,18	55,39	23,00	20,88	56,12	27,86	19,76	52,37
Jawa Timur	38,25	21,96	39,79	38,47	21,42	40,11	37,44	20,61	41,95
Banten	14,35	29,00	56,65	15,48	27,20	57,31	14,99	32,49	52,52
Bali	24,69	22,68	52,63	25,31	22,20	52,49	24,00	24,18	51,81
Nusa Tenggara Barat	43,37	14,63	42,00	45,34	13,08	41,58	45,02	15,23	39,75
Nusa Tenggara Timur	67,69	8,18	24,13	66,38	8,57	25,05	60,90	12,11	26,99
Kalimantan Barat	60,30	11,59	28,11	57,86	12,13	30,00	57,57	12,98	29,45
Kalimantan Tengah	53,80	13,86	32,34	53,14	13,80	33,06	52,70	14,66	32,64
Kalimantan Selatan	38,60	22,55	38,86	37,74	20,84	41,41	40,22	17,41	42,37
Kalimantan Timur	26,66	21,65	51,69	26,13	20,95	52,92	26,61	23,09	50,30
Sulawesi Utara	31,41	18,21	50,37	33,77	16,47	49,77	34,23	15,93	49,84
Sulawesi Tengah	47,40	15,58	37,02	50,45	12,92	36,63	49,25	12,48	38,27
Sulawesi Selatan	41,39	13,38	45,24	41,78	12,94	45,29	43,39	12,71	43,90
Sulawesi Tenggara	42,26	15,27	42,47	43,27	12,95	43,77	41,53	14,54	43,94
Gorontalo	35,13	16,28	48,59	34,84	15,56	49,60	36,66	16,59	46,75
Sulawesi Barat	58,77	9,30	31,93	59,93	10,15	29,91	57,55	10,04	32,40
Maluku	50,09	10,71	39,20	51,28	9,85	38,87	48,07	10,05	41,88
Maluku Utara	48,77	11,58	39,65	48,91	12,05	39,04	54,31	9,20	36,49
Papua Barat	48,42	11,07	40,51	48,05	8,79	43,16	48,71	10,25	41,04
Papua	73,05	4,49	22,46	73,78	3,64	22,57	72,90	5,14	21,96
Indonesia	35,05	20,59	44,36	35,43	20,14	44,43	34,36	20,60	45,04

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	516	564	529	26,54	29,01	28,98	57,08	54,41	53,55
Sumatera Utara	1 266	1 226	1 193	20,87	20,19	20,23	58,04	58,63	54,70
Sumatera Barat	465	498	628	20,76	22,31	31,31	55,89	56,36	49,95
Riau	825	730	695	30,56	27,94	28,02	50,89	50,21	46,29
Jambi	603	498	563	39,27	32,80	40,74	47,20	47,57	38,09
Sumatera Selatan	918	856	1 295	24,88	23,10	37,38	52,69	53,91	46,79
Bengkulu	220	200	267	24,44	22,65	33,29	54,69	56,28	48,17
Lampung	895	859	1 255	24,27	22,92	37,08	52,35	50,17	40,79
Kep. Bangka Belitung	147	124	172	22,95	19,44	28,78	55,50	56,54	41,83
Kepulauan Riau	134	123	107	15,13	13,64	12,65	55,50	53,84	54,49
DKI Jakarta	242	349	346	5,20	7,34	7,34	60,54	59,11	56,34
Jawa Barat	2 346	2 660	2 840	12,63	13,92	15,42	53,38	52,16	50,28
Jawa Tengah	2 688	2 762	3 561	16,83	17,21	22,30	60,17	56,83	54,16
DI Yogyakarta	361	406	584	19,65	21,50	31,62	57,89	63,71	55,92
Jawa Timur	3 821	3 837	4 400	19,81	20,05	22,84	60,81	59,57	55,25
Banten	548	543	512	11,13	11,00	11,04	62,55	63,23	54,63
Bali	481	485	541	20,48	20,78	23,79	60,55	58,12	56,11
Nusa Tenggara Barat	421	468	431	19,89	22,36	21,72	60,12	61,20	51,33
Nusa Tenggara Timur	836	799	847	36,90	36,76	40,81	59,35	58,89	56,17
Kalimantan Barat	645	691	679	29,92	32,26	33,04	55,79	58,48	54,06
Kalimantan Tengah	242	275	333	21,28	25,08	31,28	58,61	58,52	49,54
Kalimantan Selatan	478	409	605	25,67	22,19	33,38	58,71	55,75	50,92
Kalimantan Timur	204	236	237	11,84	13,36	14,62	52,74	55,33	47,74
Sulawesi Utara	171	181	199	16,91	17,76	20,97	51,16	49,34	42,63
Sulawesi Tengah	350	343	399	27,21	27,00	33,94	57,53	57,57	44,14
Sulawesi Selatan	882	861	1 137	25,86	24,69	34,55	49,17	52,25	45,27
Sulawesi Tenggara	285	289	345	27,82	27,86	35,63	59,91	59,45	49,67
Gorontalo	84	107	117	18,38	21,81	26,15	60,25	57,47	49,46
Sulawesi Barat	225	233	264	40,08	40,44	50,45	52,05	53,61	43,25
Maluku	198	192	145	29,74	28,89	24,23	57,90	60,09	57,13
Maluku Utara	133	108	134	29,09	24,08	30,08	51,52	54,19	49,97
Papua Barat	75	86	94	20,92	23,88	26,69	66,02	61,88	53,39
Papua	445	466	462	27,00	28,26	28,27	55,42	52,29	51,99
Indonesia	22 149	22 465	25 916	19,43	19,61	23,39	56,81	56,23	51,18

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013

Provinsi	0 jam*			1-14 jam			15-24 jam		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2,63	2,31	5,62	8,07	7,42	10,34	18,10	18,65	19,54
Sumatera Utara	2,12	1,68	3,15	6,67	6,08	5,39	12,76	13,42	11,75
Sumatera Barat	2,03	1,61	10,85	8,40	7,09	11,10	13,97	15,07	17,88
Riau	2,06	1,77	4,43	8,62	6,99	8,82	15,42	14,48	14,41
Jambi	2,12	1,99	11,63	9,87	5,98	15,14	17,77	15,92	19,31
Sumatera Selatan	2,01	1,92	6,97	6,32	5,49	9,90	14,86	13,73	20,79
Bengkulu	1,78	2,57	8,45	6,87	6,57	10,81	12,95	11,42	16,64
Lampung	2,67	1,68	8,78	7,61	6,91	13,19	14,26	16,21	18,42
Kep. Bangka Belitung	2,33	3,26	7,83	4,37	4,69	8,22	10,37	8,78	16,26
Kepulauan Riau	1,74	2,75	3,56	4,97	3,66	4,08	5,87	5,56	5,89
DKI Jakarta	0,84	0,59	4,31	2,06	2,13	2,61	3,98	4,44	3,74
Jawa Barat	1,85	1,29	7,04	4,25	3,97	5,42	8,58	9,13	11,07
Jawa Tengah	2,79	2,02	9,93	5,93	5,24	8,30	9,89	9,80	12,85
DI Yogyakarta	1,31	1,35	7,20	6,54	6,93	13,32	8,15	7,70	13,37
Jawa Timur	1,44	1,10	4,74	6,88	6,82	7,75	12,04	11,62	12,80
Banten	2,13	1,21	5,76	3,25	3,44	4,11	8,00	7,92	7,29
Bali	1,37	1,06	4,50	4,92	4,33	5,65	8,44	9,05	9,38
Nusa Tenggara Barat	2,06	2,21	5,03	8,36	9,01	11,45	13,88	15,54	18,16
Nusa Tenggara Timur	2,19	2,33	3,32	9,10	10,37	11,46	17,14	18,73	18,96
Kalimantan Barat	0,94	0,90	4,81	4,61	3,45	7,91	16,44	18,45	20,76
Kalimantan Tengah	1,95	1,44	4,39	6,45	6,55	7,76	12,16	12,08	16,31
Kalimantan Selatan	2,45	2,25	5,53	6,44	6,17	9,18	15,50	15,24	16,36
Kalimantan Timur	1,29	1,52	2,61	3,35	3,45	2,96	6,69	7,43	7,92
Sulawesi Utara	2,99	1,01	3,33	4,72	5,31	5,15	11,57	10,79	12,63
Sulawesi Tengah	3,99	3,14	8,99	9,38	8,28	11,62	12,31	11,86	18,59
Sulawesi Selatan	2,50	2,40	5,05	10,99	8,99	11,75	15,62	16,05	17,74
Sulawesi Tenggara	3,04	3,46	8,49	8,22	8,22	14,24	15,49	15,16	18,72
Gorontalo	5,41	2,44	6,09	5,98	5,45	6,90	9,65	11,39	12,97
Sulawesi Barat	4,40	4,25	10,64	19,45	18,18	23,92	16,23	20,15	25,69
Maluku	2,52	2,91	2,97	7,64	6,17	7,62	14,72	14,90	14,19
Maluku Utara	4,20	2,39	5,04	6,95	6,41	8,39	15,38	16,89	16,32
Papua Barat	2,25	2,93	3,71	3,94	4,68	5,20	13,11	14,27	14,07
Papua	0,64	0,45	0,77	7,03	6,02	5,69	16,02	16,14	14,30
Indonesia	2,02	1,60	6,27	6,18	5,72	7,77	11,42	11,58	13,27

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013
(lanjutan)

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	19,35	19,37	17,65	11,86	12,97	11,29	20,87	20,71	18,79
Sumatera Utara	16,19	16,57	11,74	12,88	12,07	14,21	28,98	28,54	33,23
Sumatera Barat	14,31	15,45	14,37	10,20	11,38	8,39	24,97	25,79	18,37
Riau	15,45	16,15	14,15	10,99	10,58	9,44	22,34	25,90	24,21
Jambi	23,91	23,56	15,40	12,53	14,40	9,55	19,13	20,71	15,24
Sumatera Selatan	17,78	17,87	16,59	13,61	13,00	10,16	24,24	26,81	19,30
Bengkulu	13,90	12,55	15,40	11,17	13,44	8,97	30,69	24,95	20,11
Lampung	15,67	14,68	15,15	10,27	9,12	7,37	24,16	24,71	18,96
Kep. Bangka Belitung	13,96	14,06	13,22	9,51	8,70	8,27	34,59	33,89	27,47
Kepulauan Riau	7,94	8,50	5,72	7,76	6,39	5,74	40,72	42,07	41,97
DKI Jakarta	5,24	4,48	4,11	4,33	4,40	6,49	47,12	47,71	47,60
Jawa Barat	10,74	11,96	9,47	9,28	8,89	8,80	35,38	34,99	32,38
Jawa Tengah	12,52	12,53	10,25	9,32	8,96	11,88	30,28	31,18	25,56
DI Yogyakarta	9,56	11,76	13,02	9,70	10,47	8,65	36,86	33,99	24,29
Jawa Timur	14,22	13,88	12,34	9,77	10,44	11,66	26,98	28,13	27,72
Banten	10,49	8,54	8,38	7,14	6,53	7,01	43,97	45,43	43,67
Bali	10,64	11,47	11,80	8,55	8,88	8,37	27,29	27,44	28,56
Nusa Tenggara Barat	16,75	13,48	17,05	10,08	10,11	9,98	23,31	23,89	18,70
Nusa Tenggara Timur	22,93	18,41	20,75	14,13	12,25	12,59	22,26	24,22	21,29
Kalimantan Barat	17,92	19,35	14,98	13,43	11,85	9,97	28,34	27,99	24,16
Kalimantan Tengah	14,46	17,65	16,27	10,49	11,31	10,15	28,21	26,54	23,27
Kalimantan Selatan	16,06	15,52	16,46	11,73	12,37	10,94	24,80	26,66	21,64
Kalimantan Timur	9,85	9,57	9,59	9,74	11,89	9,69	31,41	30,49	26,88
Sulawesi Utara	11,94	11,83	12,74	10,99	11,37	9,33	36,29	35,70	33,49
Sulawesi Tengah	16,25	18,51	16,00	13,93	13,61	9,54	22,31	23,26	20,07
Sulawesi Selatan	16,68	15,85	14,58	10,43	11,67	9,22	20,83	20,99	22,91
Sulawesi Tenggara	14,93	16,30	16,04	11,46	11,36	7,55	22,67	20,56	16,65
Gorontalo	12,33	12,41	13,13	13,06	10,91	10,25	25,21	25,57	21,66
Sulawesi Barat	18,62	17,31	14,44	8,83	8,60	6,48	18,02	16,01	10,28
Maluku	17,60	18,39	15,72	15,16	13,36	14,44	23,41	24,46	20,97
Maluku Utara	21,32	18,05	17,46	13,79	14,45	12,98	20,09	26,20	22,57
Papua Barat	14,83	15,39	19,33	12,33	12,29	12,16	29,97	28,58	22,50
Papua	22,27	24,26	25,96	18,96	17,95	17,17	22,72	23,01	23,91
Indonesia	13,72	13,72	12,18	10,17	10,09	10,24	29,84	30,40	27,91

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013
(lanjutan)

Provinsi (1)	49–59 jam			60 jam keatas		
	Februari (20)	Mei (21)	Agustus (22)	Februari (23)	Mei (24)	Agustus (25)
Aceh	11,52	11,01	9,44	7,60	7,54	7,33
Sumatera Utara	10,95	10,61	11,65	9,46	11,03	8,88
Sumatera Barat	15,06	13,73	10,51	11,06	9,87	8,53
Riau	11,25	11,97	12,69	13,87	12,16	11,85
Jambi	8,08	10,10	8,11	6,59	7,33	5,60
Sumatera Selatan	12,77	12,51	9,07	8,41	8,67	7,21
Bengkulu	16,13	19,06	11,10	6,52	9,44	8,52
Lampung	17,26	18,52	12,55	8,10	8,17	5,59
Kep. Bangka Belitung	15,73	18,03	10,88	9,14	8,59	7,84
Kepulauan Riau	19,04	18,87	17,39	11,96	12,21	15,65
DKI Jakarta	17,33	16,66	14,10	19,10	19,58	17,03
Jawa Barat	15,52	15,78	14,09	14,41	13,98	11,73
Jawa Tengah	17,90	18,36	13,36	11,37	11,92	7,87
DI Yogyakarta	18,89	17,64	12,15	8,98	10,17	8,00
Jawa Timur	17,28	17,05	14,34	11,38	10,96	8,65
Banten	13,16	14,55	12,46	11,86	12,38	11,33
Bali	22,29	21,42	17,67	16,50	16,36	14,07
Nusa Tenggara Barat	17,04	16,80	12,93	8,51	8,96	6,69
Nusa Tenggara Timur	7,19	7,88	6,08	5,05	5,81	5,56
Kalimantan Barat	12,15	11,34	10,42	6,17	6,66	7,00
Kalimantan Tengah	14,94	11,96	11,84	11,34	12,47	10,02
Kalimantan Selatan	13,20	12,90	11,26	9,82	8,89	8,64
Kalimantan Timur	17,93	16,73	18,81	19,75	18,91	21,54
Sulawesi Utara	11,65	12,45	12,28	9,85	11,53	11,05
Sulawesi Tengah	13,02	13,09	8,23	8,81	8,25	6,96
Sulawesi Selatan	13,84	14,94	11,11	9,10	9,09	7,63
Sulawesi Tenggara	15,21	15,07	11,03	8,98	9,87	7,28
Gorontalo	16,29	18,40	16,12	12,07	13,42	12,87
Sulawesi Barat	9,60	10,55	4,83	4,86	4,95	3,72
Maluku	10,35	10,09	12,05	8,60	9,71	12,03
Maluku Utara	11,33	9,74	9,85	6,95	5,87	7,39
Papua Barat	12,46	13,12	10,67	11,12	8,74	12,38
Papua	5,76	6,27	6,27	6,60	5,91	5,94
Indonesia	15,25	15,38	12,79	11,40	11,51	9,57

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013

Provinsi	Formal			Informal		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	41,64	41,09	43,45	58,36	58,91	56,55
Sumatera Utara	41,32	41,12	45,75	58,68	58,88	54,25
Sumatera Barat	42,18	41,78	43,39	57,82	58,22	56,61
Riau	49,95	50,08	50,99	50,05	49,92	49,01
Jambi	44,55	45,86	45,61	55,45	54,14	54,39
Sumatera Selatan	38,96	36,57	39,76	61,04	63,43	60,24
Bengkulu	34,13	32,53	38,34	65,87	67,47	61,66
Lampung	35,44	35,01	34,99	64,56	64,99	65,01
Kep. Bangka Belitung	56,33	57,27	58,92	43,67	42,73	41,08
Kepulauan Riau	71,74	71,72	74,65	28,26	28,28	25,35
DKI Jakarta	79,06	78,74	77,60	20,94	21,26	22,40
Jawa Barat	54,29	52,80	54,85	45,71	47,20	45,15
Jawa Tengah	44,56	43,83	44,71	55,44	56,17	55,29
DI Yogyakarta	53,68	56,23	52,64	46,32	43,77	47,36
Jawa Timur	41,76	42,45	42,46	58,24	57,55	57,54
Banten	62,89	64,51	65,48	37,11	35,49	34,52
Bali	51,46	51,70	55,60	48,54	48,30	44,40
Nusa Tenggara Barat	32,05	34,34	31,80	67,95	65,66	68,20
Nusa Tenggara Timur	20,41	22,38	24,02	79,59	77,62	75,98
Kalimantan Barat	36,35	38,22	37,15	63,65	61,78	62,85
Kalimantan Tengah	43,42	46,00	45,39	56,58	54,00	54,61
Kalimantan Selatan	44,12	43,63	43,08	55,88	56,37	56,92
Kalimantan Timur	65,75	63,48	61,61	34,25	36,52	38,39
Sulawesi Utara	45,72	43,10	46,72	54,28	56,90	53,28
Sulawesi Tengah	37,56	37,87	38,31	62,44	62,13	61,69
Sulawesi Selatan	43,02	42,85	43,46	56,98	57,15	56,54
Sulawesi Tenggara	40,07	40,58	39,57	59,93	59,42	60,43
Gorontalo	45,20	41,06	41,29	54,80	58,94	58,71
Sulawesi Barat	32,50	30,23	32,60	67,50	69,77	67,40
Maluku	32,96	33,66	36,51	67,04	66,34	63,49
Maluku Utara	39,76	37,06	33,09	60,24	62,94	66,91
Papua Barat	41,58	42,32	43,08	58,42	57,68	56,92
Papua	20,53	21,66	21,28	79,47	78,34	78,72
Indonesia	46,52	46,44	47,42	53,48	53,56	52,58

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013
(persen)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,23	10,28	8,38	6,38	10,16	7,81	9,06	12,47	10,30
Sumatera Utara	4,91	7,52	6,01	4,83	7,52	5,96	5,66	7,82	6,53
Sumatera Barat	5,78	7,11	6,33	6,04	7,14	6,49	6,92	7,10	6,99
Riau	3,35	5,57	4,13	4,05	8,17	5,45	4,51	7,57	5,50
Jambi	2,94	2,84	2,90	2,87	3,21	2,99	4,07	6,46	4,84
Sumatera Selatan	4,86	6,44	5,49	4,39	7,04	5,46	5,32	4,47	5,00
Bengkulu	2,15	2,09	2,12	2,64	2,36	2,53	4,25	5,56	4,74
Lampung	4,09	6,83	5,09	3,38	7,46	4,90	5,10	7,35	5,85
Kep. Bangka Belitung	3,00	3,84	3,30	1,33	2,48	1,72	3,22	4,73	3,70
Kepulauan Riau	4,78	9,25	6,39	2,90	10,32	5,60	4,02	10,76	6,25
DKI Jakarta	8,46	12,27	9,94	8,72	11,13	9,65	8,55	9,79	9,02
Jawa Barat	8,91	8,89	8,90	8,56	8,35	8,49	8,79	10,12	9,22
Jawa Tengah	5,44	5,75	5,57	5,24	5,66	5,42	6,08	5,94	6,02
DI Yogyakarta	3,44	4,25	3,80	1,96	2,88	2,37	3,69	2,91	3,34
Jawa Timur	3,87	4,20	4,00	3,87	4,18	4,00	4,48	4,11	4,33
Banten	10,24	9,85	10,10	9,72	9,84	9,76	10,03	9,62	9,90
Bali	1,94	1,84	1,89	1,99	1,80	1,90	2,15	1,35	1,79
Nusa Tenggara Barat	4,69	6,26	5,37	4,91	6,03	5,39	5,93	4,62	5,38
Nusa Tenggara Timur	1,55	2,55	2,01	2,85	3,27	3,03	2,70	3,78	3,16
Kalimantan Barat	2,88	3,39	3,09	3,31	4,40	3,74	4,17	3,82	4,03
Kalimantan Tengah	1,77	1,91	1,82	3,10	3,46	3,23	2,80	3,65	3,09
Kalimantan Selatan	3,56	4,44	3,91	3,96	4,36	4,12	3,91	3,60	3,79
Kalimantan Timur	8,63	9,38	8,87	8,36	8,66	8,46	7,38	9,65	8,04
Sulawesi Utara	5,14	11,29	7,19	5,17	11,32	7,27	5,28	9,81	6,68
Sulawesi Tengah	2,57	2,78	2,65	2,61	2,65	2,63	3,96	4,86	4,27
Sulawesi Selatan	4,78	7,55	5,83	3,86	6,83	5,01	4,85	5,54	5,10
Sulawesi Tenggara	3,00	4,17	3,47	3,28	2,86	3,11	3,63	5,80	4,46
Gorontalo	3,20	6,33	4,31	2,54	4,90	3,42	3,51	5,28	4,12
Sulawesi Barat	1,57	2,61	2,00	1,94	2,11	2,02	2,35	2,30	2,33
Maluku	5,73	8,23	6,73	5,14	8,09	6,33	8,55	11,73	9,75
Maluku Utara	3,60	8,83	5,51	3,62	10,22	6,02	2,59	6,25	3,86
Papua Barat	5,11	3,36	4,47	5,05	3,86	4,62	4,37	5,08	4,62
Papua	2,51	3,25	2,81	2,95	2,90	2,93	3,01	3,54	3,23
Indonesia	5,64	6,36	5,92	5,49	6,32	5,81	6,09	6,52	6,25

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013
(persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,15	5,62	9,06	11,48	10,85	16,21	11,23	10,30	10,29
Sumatera Utara	4,51	4,66	5,66	8,59	8,48	9,92	7,01	5,45	8,44
Sumatera Barat	5,11	5,46	6,92	9,37	8,30	11,71	5,17	7,27	7,91
Riau	2,29	3,80	4,51	7,34	7,70	9,25	5,14	7,75	6,46
Jambi	2,05	1,85	4,07	3,09	4,26	9,12	7,58	6,45	4,48
Sumatera Selatan	3,69	4,39	5,32	10,48	8,54	10,06	4,39	5,22	8,91
Bengkulu	1,37	1,17	4,25	3,47	4,41	8,04	3,67	6,38	5,72
Lampung	3,88	3,67	5,10	9,12	8,52	11,30	3,78	4,64	7,52
Kep. Bangka Belitung	2,42	1,32	3,22	3,40	1,41	7,25	10,19	6,44	3,71
Kepulauan Riau	6,48	4,51	4,02	7,09	6,97	7,87	4,33	5,37	3,68
DKI Jakarta	9,59	10,02	8,55	12,51	11,45	10,90	5,18	5,69	5,10
Jawa Barat	8,02	8,03	8,79	12,36	10,12	12,61	5,52	7,17	5,52
Jawa Tengah	5,12	4,80	6,08	7,78	7,84	10,80	4,05	4,67	4,42
DI Yogyakarta	1,37	1,36	3,69	3,53	2,32	5,96	11,18	5,15	4,19
Jawa Timur	3,10	3,42	4,48	6,59	6,33	8,77	4,63	2,78	3,53
Banten	10,50	9,99	10,03	11,62	12,39	12,74	4,72	2,92	5,62
Bali	1,94	1,75	2,15	2,24	2,59	2,89	0,89	0,98	2,72
Nusa Tenggara Barat	5,00	4,70	5,93	5,67	7,02	11,59	7,74	6,76	6,79
Nusa Tenggara Timur	1,06	2,24	2,70	5,54	7,45	7,47	5,61	2,75	7,79
Kalimantan Barat	2,38	2,79	4,17	5,18	6,41	9,00	5,22	6,36	4,73
Kalimantan Tengah	1,83	3,25	2,80	1,72	3,65	6,57	1,97	2,19	6,06
Kalimantan Selatan	3,80	3,80	3,91	5,03	6,50	7,39	1,86	1,55	2,67
Kalimantan Timur	10,34	8,82	7,38	8,22	8,62	10,37	5,20	6,60	5,78
Sulawesi Utara	4,69	5,68	5,28	11,84	10,87	10,75	6,98	5,67	5,63
Sulawesi Tengah	2,28	1,39	3,96	3,73	5,80	7,15	2,74	3,29	4,81
Sulawesi Selatan	5,31	4,30	4,85	8,88	8,32	9,29	3,10	2,42	6,50
Sulawesi Tenggara	1,87	1,39	3,63	5,59	5,55	8,53	6,80	6,27	5,53
Gorontalo	3,61	2,79	3,51	7,71	7,43	9,57	2,81	0,96	9,19
Sulawesi Barat	1,11	1,55	2,35	4,86	3,59	4,81	3,62	2,65	2,65
Maluku	3,35	3,26	8,55	13,51	12,75	17,16	7,67	5,34	14,75
Maluku Utara	2,45	1,41	2,59	10,77	15,55	6,19	7,66	5,06	7,12
Papua Barat	2,81	3,02	4,37	7,24	9,03	8,23	5,18	1,06	6,42
Papua	0,98	0,97	3,01	8,56	9,04	8,43	7,78	8,07	8,99
Indonesia	4,91	4,94	6,09	8,78	8,33	10,27	5,22	4,99	5,65

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	42,26	40,94	37,03	40,94	41,94	49,69	16,80	17,12	13,29
Sumatera Utara	44,97	45,97	37,04	45,06	45,79	51,89	9,97	8,25	11,06
Sumatera Barat	48,61	49,89	39,05	42,14	37,00	47,33	9,26	13,11	13,62
Riau	32,49	40,32	36,66	53,68	43,84	50,96	13,83	15,84	12,38
Jambi	46,08	39,09	41,05	25,25	36,90	48,70	28,67	24,02	10,25
Sumatera Selatan	44,28	54,64	32,16	49,02	37,91	49,58	6,70	7,45	18,26
Bengkulu	42,12	29,50	38,83	39,92	46,34	47,72	17,96	24,16	13,44
Lampung	53,14	52,00	42,22	41,63	41,70	47,23	5,23	6,29	10,55
Kep. Bangka Belitung	47,48	50,56	40,63	28,46	21,67	50,43	24,06	27,77	8,95
Kepulauan Riau	47,88	37,37	33,10	41,99	48,97	59,78	10,13	13,66	7,12
DKI Jakarta	32,04	33,95	33,30	56,58	52,35	55,86	11,39	13,70	10,84
Jawa Barat	59,55	62,65	60,78	35,09	30,27	34,35	5,36	7,08	4,87
Jawa Tengah	67,35	64,42	58,20	27,58	29,72	36,83	5,06	5,86	4,97
DI Yogyakarta	17,12	27,95	21,11	33,08	32,06	60,78	49,80	39,99	18,11
Jawa Timur	53,87	59,46	48,57	36,64	34,45	45,74	9,49	6,09	5,69
Banten	60,71	59,55	52,64	33,42	36,55	41,20	5,86	3,90	6,15
Bali	58,99	52,28	25,82	34,91	40,89	52,42	6,10	6,82	21,77
Nusa Tenggara Barat	66,11	60,71	43,55	21,56	28,22	43,17	12,33	11,07	13,28
Nusa Tenggara Timur	42,00	58,31	40,87	38,96	35,92	40,58	19,04	5,77	18,55
Kalimantan Barat	57,52	55,07	46,79	30,61	32,46	45,13	11,87	12,46	8,08
Kalimantan Tengah	71,38	70,77	34,09	18,73	22,77	48,27	9,89	6,46	17,64
Kalimantan Selatan	70,90	67,86	53,14	25,83	29,11	40,59	3,27	3,03	6,27
Kalimantan Timur	59,11	51,71	44,07	32,64	38,03	47,09	8,25	10,27	8,84
Sulawesi Utara	37,49	46,40	36,22	51,84	45,69	53,56	10,68	7,91	10,22
Sulawesi Tengah	57,56	34,75	46,38	30,80	51,36	40,72	11,64	13,89	12,90
Sulawesi Selatan	59,41	54,28	35,53	34,00	39,39	46,15	6,60	6,33	18,32
Sulawesi Tenggara	33,43	27,32	31,62	37,79	42,49	51,88	28,79	30,19	16,50
Gorontalo	59,67	58,05	32,58	33,88	38,87	44,73	6,46	3,08	22,69
Sulawesi Barat	40,71	57,19	47,45	45,70	33,66	41,21	13,59	9,15	11,35
Maluku	29,56	30,31	21,85	56,06	60,02	57,12	14,38	9,67	21,02
Maluku Utara	26,17	13,58	34,44	57,64	75,92	43,51	16,19	10,51	22,05
Papua Barat	35,75	38,06	27,29	50,09	59,28	53,99	14,16	2,66	18,72
Papua	26,27	24,73	32,50	56,32	55,75	48,50	17,41	19,51	19,00
Indonesia	53,93	54,99	48,39	37,50	36,52	43,11	8,57	8,49	8,50

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	59,19	54,68	61,35	30,94	35,16	29,12	9,87	10,16	9,53
Sumatera Utara	63,82	63,36	58,63	30,73	31,34	34,21	5,45	5,30	7,16
Sumatera Barat	67,26	70,79	64,76	22,66	23,79	26,02	10,07	5,42	9,21
Riau	68,77	66,33	67,35	20,23	23,82	26,30	11,00	9,85	6,35
Jambi	65,90	64,64	69,05	25,47	26,06	25,07	8,63	9,30	5,87
Sumatera Selatan	72,87	72,44	68,68	21,22	23,03	26,16	5,91	4,54	5,16
Bengkulu	66,48	72,68	66,73	26,76	16,86	27,25	6,76	10,46	6,02
Lampung	75,96	76,20	70,91	18,61	22,32	24,50	5,43	1,49	4,59
Kep. Bangka Belitung	71,01	74,11	72,02	27,10	22,87	24,18	1,89	3,02	3,80
Kepulauan Riau	66,33	74,15	68,94	32,93	25,85	30,75	0,74	0,00	0,31
DKI Jakarta	47,40	42,29	40,02	33,65	37,22	44,18	18,95	20,50	15,80
Jawa Barat	81,52	81,50	83,73	13,50	13,37	12,42	4,97	5,13	3,85
Jawa Tengah	82,43	82,43	79,88	12,85	14,12	16,43	4,72	3,45	3,69
DI Yogyakarta	58,85	53,65	54,80	33,62	33,16	37,87	7,52	13,18	7,34
Jawa Timur	77,86	81,41	80,44	17,19	14,99	16,22	4,95	3,60	3,34
Banten	78,10	81,48	77,00	16,53	13,15	16,53	5,37	5,37	6,47
Bali	66,97	67,38	58,22	20,85	23,87	33,80	12,18	8,75	7,98
Nusa Tenggara Barat	74,56	73,59	78,25	18,41	18,62	16,53	7,03	7,79	5,22
Nusa Tenggara Timur	77,56	80,88	72,72	15,57	15,56	21,74	6,87	3,55	5,54
Kalimantan Barat	76,37	73,16	78,90	16,62	20,27	16,94	7,01	6,57	4,15
Kalimantan Tengah	72,08	65,67	71,18	21,75	29,17	23,58	6,17	5,16	5,23
Kalimantan Selatan	81,07	82,72	75,06	14,45	14,22	18,58	4,48	3,06	6,36
Kalimantan Timur	59,38	60,33	60,90	31,98	34,75	31,99	8,64	4,93	7,11
Sulawesi Utara	65,50	62,84	62,87	28,49	34,48	31,90	6,01	2,67	5,24
Sulawesi Tengah	73,44	75,92	69,05	20,15	16,64	22,26	6,41	7,44	8,69
Sulawesi Selatan	67,36	64,53	61,10	22,18	25,82	28,73	10,47	9,65	10,16
Sulawesi Tenggara	70,15	59,45	58,41	21,08	26,29	30,39	8,77	14,26	11,21
Gorontalo	84,09	81,53	82,53	10,24	14,77	15,57	5,67	3,70	1,89
Sulawesi Barat	76,36	70,92	68,23	18,97	21,93	24,73	4,67	7,15	7,04
Maluku	58,40	55,55	62,41	34,30	34,22	32,60	7,30	10,23	4,99
Maluku Utara	61,77	61,71	66,24	30,01	29,16	25,94	8,23	9,13	7,82
Papua Barat	64,56	69,02	61,98	31,16	23,81	23,38	4,28	7,16	14,64
Papua	83,65	89,26	89,78	14,44	9,64	8,64	1,91	1,10	1,57
Indonesia	74,74	75,28	74,77	19,04	19,38	20,02	6,22	5,34	5,21

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja
Menurut Provinsi, 2013
(dalam ribu)

Provinsi	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 115	1 144	1 243
Sumatera Utara	2 420	2 435	2 620
Sumatera Barat	1 009	1 021	1 270
Riau	1 235	1 321	1 502
Jambi	704	735	866
Sumatera Selatan	1 523	1 530	1 837
Bengkulu	318	337	408
Lampung	1 631	1 588	1 962
Kep. Bangka Belitung	270	289	329
Kepulauan Riau	397	407	475
DKI Jakarta	2 381	2 309	2 428
Jawa Barat	11 463	11 105	11 907
Jawa Tengah	7 037	6 980	7 033
DI Yogyakarta	847	828	863
Jawa Timur	8 562	8 755	8 664
Banten	2 504	2 554	2 954
Bali	640	670	758
Nusa Tenggara Barat	942	972	1 106
Nusa Tenggara Timur	773	857	976
Kalimantan Barat	826	830	928
Kalimantan Tengah	436	464	511
Kalimantan Selatan	758	787	842
Kalimantan Timur	825	807	1 003
Sulawesi Utara	596	587	683
Sulawesi Tengah	520	545	635
Sulawesi Selatan	2 074	2 036	2 266
Sulawesi Tenggara	463	460	527
Gorontalo	266	241	287
Sulawesi Barat	218	208	266
Maluku	335	347	401
Maluku Utara	228	236	256
Papua Barat	175	176	188
Papua	417	439	476
Indonesia	53 907	53 999	58 469

Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013
(persen)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	17,47	51,02	34,44	18,36	51,57	35,16	20,07	55,37	37,93
Sumatera Utara	14,38	39,76	27,28	14,43	39,95	27,40	14,29	43,90	29,33
Sumatera Barat	15,42	43,21	29,68	15,32	43,86	29,96	20,81	52,49	37,06
Riau	12,88	49,22	30,49	13,39	52,51	32,35	16,73	57,27	36,38
Jambi	14,65	47,63	30,79	13,83	50,90	31,98	17,08	58,45	37,34
Sumatera Selatan	14,60	41,90	28,06	15,27	41,24	28,08	17,64	49,80	33,50
Bengkulu	12,71	39,15	25,67	13,42	41,36	27,11	17,72	48,25	32,68
Lampung	13,13	47,00	29,56	12,93	45,47	28,71	16,34	55,42	35,30
Kep. Bangka Belitung	11,88	47,51	28,92	12,43	50,76	30,76	14,18	57,04	34,68
Kepulauan Riau	12,10	47,73	29,47	12,99	47,67	29,90	14,45	55,40	34,42
DKI Jakarta	16,87	46,54	31,56	15,47	45,86	30,51	15,87	48,28	31,91
Jawa Barat	14,54	58,03	35,99	14,06	55,96	34,73	16,32	58,22	36,99
Jawa Tengah	15,80	42,49	29,39	14,77	43,00	29,14	15,79	42,28	29,28
DI Yogyakarta	20,71	40,29	30,73	20,85	38,71	29,98	22,47	39,36	31,11
Jawa Timur	14,80	44,22	29,88	15,50	44,79	30,51	14,98	44,44	30,08
Banten	13,36	50,11	31,38	13,00	51,37	31,81	16,97	56,74	36,47
Bali	14,55	27,62	21,09	15,05	28,87	21,97	16,12	33,17	24,65
Nusa Tenggara Barat	15,93	41,96	29,65	15,29	44,15	30,51	19,43	48,12	34,56
Nusa Tenggara Timur	15,94	33,67	25,05	15,83	38,86	27,66	19,28	42,65	31,28
Kalimantan Barat	14,40	40,32	27,09	13,37	41,54	27,16	16,27	44,81	30,25
Kalimantan Tengah	12,56	43,73	27,37	13,76	45,85	29,01	14,33	51,06	31,79
Kalimantan Selatan	13,94	42,43	28,12	13,18	45,12	29,07	14,71	47,28	30,92
Kalimantan Timur	11,22	52,14	30,40	9,33	52,29	29,46	15,19	60,05	36,21
Sulawesi Utara	15,30	56,12	35,37	15,42	54,77	34,77	18,66	62,55	40,24
Sulawesi Tengah	12,43	44,73	28,21	12,43	47,24	29,43	14,88	54,17	34,08
Sulawesi Selatan	17,23	53,92	36,42	17,17	52,56	35,69	19,53	57,73	39,51
Sulawesi Tenggara	15,76	44,81	30,42	15,41	44,49	30,08	18,15	49,97	34,21
Gorontalo	16,25	54,84	35,67	14,35	49,68	32,12	18,04	57,74	38,00
Sulawesi Barat	14,91	40,01	27,59	13,99	38,07	26,16	16,56	49,44	33,18
Maluku	18,10	45,68	31,91	19,55	46,14	32,87	22,22	53,11	37,69
Maluku Utara	15,50	49,38	32,10	16,47	50,34	33,06	17,71	54,28	35,62
Papua Barat	19,31	46,05	31,75	18,93	46,48	31,74	19,86	49,33	33,59
Papua	11,44	29,08	19,75	12,68	29,39	20,55	13,39	31,66	21,99
Indonesia	14,88	46,64	30,79	14,69	46,74	30,74	16,42	49,72	33,10

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	57,57	56,84	55,14	29,89	30,18	31,57	12,54	12,98	13,30
Sumatera Utara	59,93	58,79	57,28	31,52	32,19	34,16	8,55	9,02	8,56
Sumatera Barat	60,21	59,35	59,70	28,46	28,95	28,26	11,33	11,71	12,04
Riau	58,64	57,80	59,13	30,23	31,06	30,33	11,13	11,15	10,54
Jambi	65,30	63,01	63,07	23,72	25,87	25,85	10,98	11,12	11,08
Sumatera Selatan	65,93	67,96	65,11	25,69	24,24	24,64	8,38	7,80	10,25
Bengkulu	65,19	63,88	60,69	24,41	26,55	28,16	10,41	9,56	11,15
Lampung	69,73	69,37	67,32	23,23	23,98	24,46	7,03	6,64	8,21
Kep. Bangka Belitung	64,67	66,10	65,35	27,55	26,47	25,72	7,78	7,43	8,92
Kepulauan Riau	47,22	46,41	40,40	37,83	39,33	47,50	14,95	14,26	12,09
DKI Jakarta	33,19	32,70	34,57	44,95	44,09	46,24	21,85	23,21	19,19
Jawa Barat	66,07	66,23	66,75	25,28	25,40	25,11	8,66	8,37	8,13
Jawa Tengah	73,29	72,67	72,72	19,75	20,53	20,52	6,96	6,79	6,76
DI Yogyakarta	47,52	48,84	51,48	35,57	32,76	34,08	16,91	18,40	14,44
Jawa Timur	69,55	69,48	70,46	22,24	21,76	22,56	8,21	8,77	6,98
Banten	58,41	58,18	57,16	29,05	28,80	32,01	12,54	13,03	10,83
Bali	57,54	56,76	53,22	29,50	30,02	32,47	12,96	13,21	14,32
Nusa Tenggara Barat	71,03	69,54	69,43	20,41	21,65	20,04	8,56	8,82	10,53
Nusa Tenggara Timur	79,09	79,02	75,29	14,10	14,62	17,18	6,81	6,37	7,53
Kalimantan Barat	74,74	73,74	72,87	18,24	18,93	20,24	7,02	7,32	6,90
Kalimantan Tengah	71,06	70,31	68,29	19,82	20,17	22,71	9,12	9,52	9,00
Kalimantan Selatan	73,05	73,53	70,27	20,09	18,43	20,83	6,86	8,03	8,90
Kalimantan Timur	50,71	49,55	51,17	35,21	37,30	36,52	14,08	13,15	12,31
Sulawesi Utara	57,52	59,32	54,60	31,49	30,53	33,28	11,00	10,15	12,12
Sulawesi Tengah	66,82	65,62	64,26	21,90	23,27	24,31	11,28	11,11	11,43
Sulawesi Selatan	65,27	63,22	60,28	22,32	23,70	25,34	12,42	13,08	14,38
Sulawesi Tenggara	61,87	61,23	59,57	23,45	23,79	27,11	14,68	14,98	13,32
Gorontalo	71,18	71,14	70,60	18,94	17,91	19,24	9,88	10,95	10,16
Sulawesi Barat	73,66	74,16	70,04	18,81	18,89	19,98	7,52	6,95	9,98
Maluku	59,46	58,76	53,64	27,93	29,77	32,46	12,61	11,46	13,90
Maluku Utara	58,85	58,12	60,89	29,51	29,38	27,16	11,65	12,49	11,95
Papua Barat	56,90	58,13	56,22	30,90	30,29	30,29	12,20	11,58	13,48
Papua	75,20	74,86	74,59	18,51	18,06	18,58	6,29	7,08	6,83
Indonesia	65,00	64,64	64,35	25,28	25,47	26,24	9,72	9,89	9,41

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin,
2013
(rupiah)

Lapangan Usaha	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 245 174	806 742	1 151 414	1 258 239	807 286	1 167 033	1 350 249	829 269	1 235 765
2	3 411 456	1 743 368	3 314 664	3 411 985	2 254 436	3 352 590	3 291 086	2 296 194	3 242 802
3	1 523 430	1 074 754	1 353 754	1 573 564	1 131 296	1 409 098	1 899 128	1 399 547	1 716 855
4	2 337 013	1 837 681	2 280 295	2 037 438	1 910 238	2 023 159	2 303 102	3 310 202	2 439 168
5	1 548 548	2 442 073	1 583 840	1 549 833	1 904 571	1 567 812	1 681 146	2 445 661	1 713 530
6	1 312 506	1 059 820	1 213 547	1 335 010	1 092 290	1 238 419	1 728 852	1 332 873	1 574 857
7	1 939 499	2 731 892	2 016 394	1 862 926	2 352 235	1 917 813	2 218 892	2 158 125	2 211 943
8	2 314 766	2 453 457	2 351 996	2 445 601	2 551 147	2 475 160	2 732 450	2 692 313	2 721 417
9	2 207 291	1 615 265	1 916 658	2 174 136	1 593 628	1 890 972	2 449 516	1 787 316	2 141 817
Total	1 799 845	1 409 200	1 661 674	1 812 606	1 427 717	1 675 728	2 061 258	1 615 889	1 909 478

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2013
(rupiah)

Lapangan Usaha	Februari			Mei			Agustus		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 336 170	1 088 784	1 151 414	1 313 360	1 118 263	1 167 033	1 379 607	1 188 800	1 235 765
2	4 447 661	1 937 113	3 314 664	4 566 537	1 893 876	3 352 590	4 303 694	2 269 808	3 242 802
3	1 438 660	1 156 745	1 353 754	1 494 213	1 184 638	1 409 098	1 856 077	1 259 522	1 716 855
4	2 474 237	1 580 425	2 280 295	2 166 631	1 586 108	2 023 159	2 663 851	1 758 009	2 439 168
5	1 734 218	1 302 486	1 583 840	1 704 107	1 314 547	1 567 812	1 865 817	1 378 042	1 713 530
6	1 269 285	982 573	1 213 547	1 301 146	988 235	1 238 419	1 688 481	1 043 733	1 574 857
7	2 191 573	1 422 991	2 016 394	2 058 066	1 473 999	1 917 813	2 386 285	1 643 005	2 211 943
8	2 525 153	1 463 893	2 351 996	2 645 975	1 489 014	2 475 160	2 888 555	1 617 011	2 721 417
9	2 024 416	1 679 033	1 916 658	1 993 455	1 654 461	1 890 972	2 293 105	1 785 458	2 141 817
Total	1 805 573	1 354 210	1 661 674	1 816 131	1 363 511	1 675 728	2 090 970	1 466 071	1 909 478

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013
(rupiah)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 708 306	1 546 058	1 654 659	1 721 586	1 561 722	1 667 122	1 751 607	1 703 862	1 735 483
Sumatera Utara	1 665 284	1 368 450	1 572 150	1 683 992	1 370 481	1 582 867	1 793 776	1 451 899	1 686 067
Sumatera Barat	1 869 386	1 661 076	1 785 819	1 869 826	1 688 917	1 798 587	1 920 849	1 692 604	1 835 055
Riau	2 023 681	1 633 334	1 914 546	2 040 777	1 651 277	1 930 449	2 190 378	1 740 307	2 065 287
Jambi	1 591 487	1 340 814	1 511 661	1 605 930	1 354 329	1 523 987	1 852 875	1 683 679	1 800 359
Sumatera Selatan	1 651 845	1 420 495	1 571 972	1 672 382	1 425 138	1 588 915	1 866 000	1 655 342	1 794 051
Bengkulu	1 799 106	1 522 114	1 693 306	1 824 821	1 542 073	1 710 124	1 969 047	1 599 817	1 834 371
Lampung	1 366 828	1 172 615	1 299 472	1 378 498	1 174 680	1 310 680	1 688 471	1 500 445	1 627 461
Kep. Bangka Belitung	1 824 094	1 356 951	1 678 659	1 841 003	1 366 912	1 690 144	2 053 954	1 588 584	1 918 126
Kepulauan Riau	2 559 118	2 000 245	2 361 330	2 581 243	2 028 155	2 388 768	3 672 019	2 371 562	3 274 805
DKI Jakarta	2 466 370	1 926 438	2 264 050	2 488 387	1 940 330	2 269 805	3 096 107	2 423 146	2 856 675
Jawa Barat	1 768 019	1 438 947	1 663 361	1 781 577	1 463 029	1 677 134	1 982 872	1 678 678	1 888 843
Jawa Tengah	1 475 355	1 069 595	1 309 478	1 481 844	1 073 212	1 320 408	1 518 812	1 100 906	1 353 704
DI Yogyakarta	1 670 829	1 331 887	1 528 716	1 696 578	1 342 207	1 552 869	1 834 705	1 415 381	1 658 721
Jawa Timur	1 490 875	1 115 084	1 342 775	1 514 254	1 120 830	1 360 710	1 661 270	1 265 649	1 516 254
Banten	2 076 716	1 619 177	1 916 511	2 102 935	1 644 908	1 948 570	2 511 979	2 048 995	2 360 641
Bali	1 768 291	1 473 372	1 653 608	1 792 815	1 499 250	1 670 532	2 038 442	1 569 031	1 859 716
Nusa Tenggara Barat	1 682 782	1 194 380	1 500 807	1 699 186	1 217 386	1 527 361	2 009 024	1 409 882	1 781 554
Nusa Tenggara Timur	1 678 132	1 567 595	1 638 158	1 683 815	1 570 795	1 648 004	1 858 580	1 646 424	1 786 966
Kalimantan Barat	1 666 902	1 390 426	1 585 237	1 672 250	1 376 683	1 594 157	2 055 402	1 651 262	1 939 928
Kalimantan Tengah	1 929 686	1 699 513	1 866 535	1 933 376	1 722 371	1 874 832	2 155 888	1 814 449	2 061 451
Kalimantan Selatan	1 848 628	1 452 167	1 741 014	1 871 173	1 467 033	1 761 138	2 297 911	1 675 601	2 112 199
Kalimantan Timur	2 507 966	1 804 123	2 320 725	2 528 139	1 827 726	2 329 342	3 023 017	2 040 307	2 772 880
Sulawesi Utara	1 816 057	1 864 899	1 832 064	1 838 230	1 887 826	1 855 313	2 099 344	2 174 179	2 124 218
Sulawesi Tengah	1 765 551	1 480 621	1 663 250	1 820 609	1 462 422	1 688 217	1 986 559	1 637 227	1 859 472
Sulawesi Selatan	1 825 762	1 491 464	1 695 889	1 853 121	1 506 634	1 714 806	2 074 187	1 707 447	1 937 647
Sulawesi Tenggara	1 918 034	1 583 863	1 797 934	1 940 290	1 604 705	1 812 724	2 073 591	1 729 575	1 958 091
Gorontalo	1 579 923	1 414 579	1 507 358	1 587 586	1 440 142	1 521 062	1 750 506	1 548 936	1 664 495
Sulawesi Barat	1 618 686	1 271 516	1 497 155	1 639 090	1 287 804	1 506 044	2 247 377	1 627 116	2 033 627
Maluku	1 954 787	1 834 471	1 910 963	1 965 922	1 850 802	1 922 408	2 467 005	1 975 053	2 288 089
Maluku Utara	2 029 058	1 813 671	1 963 201	2 054 800	1 845 914	1 987 443	2 288 529	1 853 495	2 145 553
Papua Barat	2 192 895	2 068 660	2 160 796	2 229 065	2 086 462	2 187 580	2 905 906	2 214 957	2 706 309
Papua	2 744 904	1 992 026	2 553 870	2 761 875	2 034 281	2 569 276	3 266 618	2 578 394	3 099 568
Indonesia	1 799 845	1 409 200	1 661 674	1 812 606	1 427 717	1 675 728	2 061 258	1 615 889	1 909 478

Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah,
2013
(rupiah)

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 866 116	1 493 185	1 654 659	1 881 611	1 506 600	1 667 122	2 102 313	1 472 515	1 735 483
Sumatera Utara	1 635 041	1 452 010	1 572 150	1 641 670	1 455 462	1 582 867	1 782 582	1 485 638	1 686 067
Sumatera Barat	1 947 673	1 591 618	1 785 819	1 948 541	1 600 575	1 798 587	2 016 737	1 608 951	1 835 055
Riau	2 196 282	1 611 460	1 914 546	2 212 899	1 623 097	1 930 449	2 404 037	1 701 274	2 065 287
Jambi	1 722 391	1 381 183	1 511 661	1 740 710	1 387 997	1 523 987	2 247 316	1 468 344	1 800 359
Sumatera Selatan	1 779 672	1 308 659	1 571 972	1 791 468	1 331 237	1 588 915	2 159 326	1 305 207	1 794 051
Bengkulu	1 920 519	1 452 749	1 693 306	1 966 980	1 465 598	1 710 124	2 118 496	1 549 819	1 834 371
Lampung	1 535 830	1 142 543	1 299 472	1 548 144	1 150 669	1 310 680	2 007 911	1 301 914	1 627 461
Kep. Bangka Belitung	1 763 809	1 550 150	1 678 659	1 774 341	1 575 194	1 690 144	2 063 513	1 700 602	1 918 126
Kepulauan Riau	2 429 871	1 704 676	2 361 330	2 426 934	1 964 347	2 388 768	3 407 441	1 791 214	3 274 805
DKI Jakarta	2 264 050	-	2 264 050	2 269 805	-	2 269 805	2 856 675	-	2 856 675
Jawa Barat	1 775 353	1 252 310	1 663 361	1 778 524	1 256 841	1 677 134	1 999 992	1 359 514	1 888 843
Jawa Tengah	1 393 988	1 176 052	1 309 478	1 406 166	1 180 811	1 320 408	1 436 706	1 202 136	1 353 704
DI Yogyakarta	1 571 513	1 399 487	1 528 716	1 593 471	1 411 489	1 552 869	1 731 142	1 370 730	1 658 721
Jawa Timur	1 452 246	1 118 360	1 342 775	1 474 541	1 138 277	1 360 710	1 650 668	1 207 643	1 516 254
Banten	2 056 316	1 311 431	1 916 511	2 073 061	1 328 591	1 948 570	2 487 845	1 596 000	2 360 641
Bali	1 738 713	1 463 673	1 653 608	1 743 661	1 473 950	1 670 532	1 960 657	1 567 333	1 859 716
Nusa Tenggara Barat	1 643 789	1 318 091	1 500 807	1 667 142	1 340 715	1 527 361	1 945 385	1 501 874	1 781 554
Nusa Tenggara Timur	1 842 403	1 476 189	1 638 158	1 855 287	1 484 419	1 648 004	2 175 654	1 446 268	1 786 966
Kalimantan Barat	1 720 978	1 449 182	1 585 237	1 748 399	1 453 760	1 594 157	2 138 443	1 723 745	1 939 928
Kalimantan Tengah	2 142 784	1 644 091	1 866 535	2 163 974	1 657 170	1 874 832	2 220 556	1 939 077	2 061 451
Kalimantan Selatan	1 837 576	1 623 165	1 741 014	1 830 686	1 677 057	1 761 138	2 142 994	2 071 288	2 112 199
Kalimantan Timur	2 432 937	2 021 460	2 320 725	2 435 458	2 021 478	2 329 342	3 031 467	2 159 044	2 772 880
Sulawesi Utara	1 931 796	1 690 209	1 832 064	1 957 389	1 689 790	1 855 313	2 254 673	1 887 453	2 124 218
Sulawesi Tengah	1 837 244	1 522 488	1 663 250	1 862 157	1 546 814	1 688 217	2 205 159	1 514 453	1 859 472
Sulawesi Selatan	1 969 637	1 398 349	1 695 889	1 976 668	1 398 487	1 714 806	2 223 703	1 510 891	1 937 647
Sulawesi Tenggara	2 040 483	1 581 093	1 797 934	2 048 773	1 589 701	1 812 724	2 274 800	1 705 112	1 958 091
Gorontalo	1 700 399	1 260 823	1 507 358	1 710 531	1 271 377	1 521 062	1 962 017	1 329 398	1 664 495
Sulawesi Barat	1 616 166	1 409 094	1 497 155	1 618 882	1 420 151	1 506 044	2 020 865	2 041 431	2 033 627
Maluku	2 025 767	1 753 956	1 910 963	2 034 067	1 750 390	1 922 408	2 649 234	1 684 024	2 288 089
Maluku Utara	2 219 678	1 796 770	1 963 201	2 229 255	1 799 872	1 987 443	2 260 095	2 044 843	2 145 553
Papua Barat	2 352 639	2 037 419	2 160 796	2 360 445	2 042 770	2 187 580	2 662 535	2 738 101	2 706 309
Papua	2 674 035	2 370 982	2 553 870	2 661 373	2 421 548	2 569 276	3 290 834	2 732 185	3 099 568
Indonesia	1 805 573	1 354 210	1 661 674	1 816 131	1 363 511	1 675 728	2 090 970	1 466 071	1 909 478

Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal

INF = Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id

